

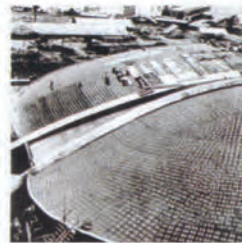


SELAYANG PANDANG GEDUNG DPR RI



The image shows an aerial view of the DPR RI building complex. The main building is a large, modern structure with a prominent entrance. In the foreground, there is a large parking lot filled with cars. To the left, there is a long, narrow structure, possibly a walkway or a covered area. The background shows other buildings and a clear sky. The title 'SELAYANG PANDANG GEDUNG DPR RI' is overlaid in large, white, 3D-style letters. Above the title is the emblem of the DPR RI, which features a Garuda bird in the center, surrounded by a circular arrangement of stars, and a banner below it with the text 'DPR RI'.

SELAYANG PANDANG GEDUNG DPR RI





SELAYANG PANDANG Gedung DPR RI





Komplek Gedung DPR/MPR RI di lihat dari atas



Komplek Gedung DPR/MPR RI di lihat dari depan saat malam hari

SAMBUTAN

Gedung DPR/MPR RI merupakan salah satu gedung yang bersejarah di Indonesia. Gedung ini dirancang dan dibangun antara lain oleh Ir. Soejoedi dan Ir. Soetami serta ratusan armada semut, yakni ratusan tenaga muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi teknik yang ada di Indonesia, yang bergotong-royong dan perusahaan-perusahaan swasta.

Kawasan kompleks gedung DPR/MPR semula dibangun untuk keperluan “Political Venues” dalam rangka “*Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)*”, yang kemudian dengan keputusan Presidium Kabinet Ampera, Jendral Soeharto setelah tahun 1966, dialih fungsikan menjadi Gedung DPR/MPR RI.

Pembangunan Gedung DPR/MPR RI dimulai pada tanggal 19 April 1965. Saat dilaksanakan pemancangan tiang pertama, bertepatan dengan Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara. Dalam perkembangannya, dengan adanya reformasi terjadi perubahan struktur ketatanegaraan yang ditandai dengan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga lahirlah sebuah lembaga baru DPD, maka dibangunlah gedung DPD.

Bentuk arsitektur yang unik dan artistik membuat Gedung DPR/MPR/DPD RI menarik dan indah. Bangunan ini merupakan buah karya dari insiyur-insiyur muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tekat, keuletan, ketekunan, dan kesabaran serta dedikasi yang tinggi akhirnya menghasilkan bentuk struktur bangunan yang mengundang kekaguman. Pendekatan sejarah dan keragaman masyarakat kita, dilukiskan dalam setiap ruang-ruang rapat yang ada.

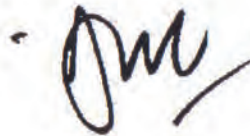
Kekaguman masyarakat terpusat pada uniknya atap kubah gedung Nusantara. Betapa tidak, tanpa penyangga ternyata para insinyur kita mampu membuat sebuah beton yang tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini, gedung Nusantara yang memiliki atap kubah yang memiliki atap kubah unik tersebut, menjadi tempat dilangsungkannya sidang Paripurna untuk pelantikan para Anggota DPR/MPR/DPD, dan menjadi tempat dilantiknya Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada perkembangannya kemudian DPR/MPR RI menjadi gedung parlemen yang mendapat ikon sebagai salah satu objek wisata penting dan bernilai sejarah tinggi yang ada di Jakarta. Luas lahan yang mencapai 41,2 ha menjadikan kawasan kompleks perkantoran DPR/MPR RI sebagai kawasan yang memiliki fungsi penyerapan air yang cukup tinggi. Pohon-pohon besar dan rindang yang nyaman dan membawa ketenangan saat beraktifitas.

Sebagai tempat representasi dan penyalur aspirasi masyarakat, kawasan gedung selalu terbuka untuk semua kalangan masyarakat, baik yang ingin menyampaikan aspirasi, meninjau rapat DPR, wisata, *study tour*, penelitian, bahkan juga sangat terbuka bagi masyarakat yang sekedar ingin bertemu dengan para Wakilnya.

Pembaca yang budiman, semoga buku ini dapat membangkitkan rasa cinta kita terhadap Gedung DPR/MPR/DPD RI, terimakasih

SEKRETARIS JENDERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Iskandar', with a horizontal line extending from the bottom right of the signature.

Ir. Indra Iskandar, M.Si

KATA PENGANTAR

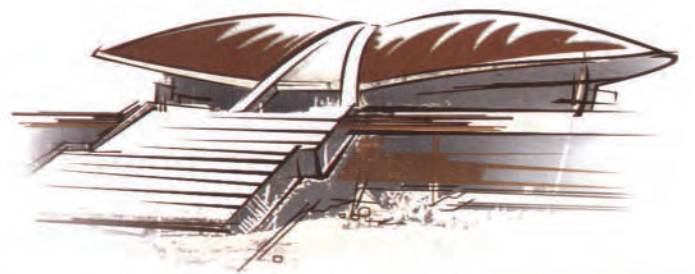


Bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi demokrasi. Dalam kaitan ini sudah selayaknya kita memberikan tempat yang terhormat kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Sehingga menjadi wajar jika bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat keberadaan Lembaga Negara menjadi sangat penting untuk dicatat dan dibukukan sejarahnya.

Sebagaimana sudah banyak diketahui, Gedung DPR memiliki kaitan dengan sejarah kebangsaan Indonesia, khususnya dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat serta perkembangan lembaga negara tersebut. Namun yang mungkin belum banyak disadari, gedung ini juga memiliki kaitan erat dengan kemampuan berkarya di bidang rancang bangun, para teknisi Indonesia. Selama proses pembangunan gedung tersebut, putra-putra Indonesia telah ikut serta memberikan sumbangan bagi perkembangan rancang bangun di Tanah Air. Dimana rancang bangun tersebut belum pernah ada yang sempurna di seluruh dunia.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama, catatan sejarah mengenai sejumlah gedung lain di berbagai kota yang pernah dipakai oleh lembaga negara atau lembaga yang berfungsi sama, di masa-masa sebelumnya. Kedua, alasan kuat mengapa Pemerintah Republik Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk membangun gedung ini. Dan ketiga, telah terjadi perubahan situasi yang membuahkan dampak perubahan, baik di dalam pembangunan maupun penggunaan gedung MPR/DPR/DPD.

Buku ini dipersembahkan sebagai kenangan kepada ribuan armada semut, yakni seluruh teknisi Indonesia yang telah bekerja keras ketika bersama-sama menyelesaikan pembangunan yang sekarang ini kita namakan Gedung MPR/DPR/DPD. Tanpa keteladanan dan ketekunan mereka, masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah memiliki bangunan monumental seperti sekarang ini, tempat dimana putra-putri terbaik bangsa memperjuangkan suara rakyat.



DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Sejarah Gedung DPR.....	1
Diawali Proyek Conefo.....	15
Rancang bangun Indonesia.....	20
Beragam kemudahan dan kenyamanan.....	25
Penggemblengan SDM teknik bangunan.....	28
Keunikan arsitektur.....	36
Titik pandang utama.....	40
Landscaping Proyek Conefo.....	44
Menjadi gedung DPR.....	49
Elemen Estetika.....	67
Menghadapi perkembangan jaman.....	74
Nama – nama gedung di kompleks DPR RI saat ini.....	77
Penutup.....	78
Soejoedi Wirjoatmodjo, Dip.Ing.....	79
Prof. Dr. Ir. Sutami.....	81
Sebagian dari mereka yang terlibat dalam pembangunan.....	82

SEJARAH GEDUNG DPR

Jumat pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang sejak lama didambakan telah datang. Namun, perangkat yang ada tidak lebih dari selembar kertas proklamasi, bendera merah-putih serta lagu Indonesia Raya.

Kemerdekaan yang hanya bemedalkan semangat dan keikhlasan berkorban itu menghendaki segala sesuatu berlangsung serba cepat. Sehingga yang terjadi, sehari setelah proklamasi, disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya barulah dibentuk kabinet pertama memakai sistem presidensial. Sewaktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan berlakunya konstitusi yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan mengenai berbagai macam kelengkapan Negara. Kelengkapan tersebut terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari semua kelengkapan ini, yang sudah terbentuk dari lembaga Kepresidenan dan kementerian Negara. Tetapi bagaimanapun, rakyat merupakan sumber dari segala kekuasaan. Konstitusi sekedar sarana yang justru harus bisa diabdikan sepenuhnya untuk upaya mensejahterakan rakyat. Pada sisi lain, kedaulatan dari rakyat juga harus bisa ditampung, sehingga pelaksanaan pemerintah secara mantap bisa berlangsung. Mandat dari rakyat, menurut kenyataan belum bisa terwujud pada hari-hari pertama dimulainya kehidupan bernegara. Sebagai salah satu upaya untuk bisa mendengarkan suara hati rakyat, akhirnya dibentuklah suatu lembaga baru.



Komplek Gedung DPR/MPR RI di lihat dari atas

Ini dilakukukan dengan mengacu persyaratan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 dimana antara lain dinyatakan, "... sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional." Atas dasar ini, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan; serta Komite Nasional Daerah, sambil menunggu nantinya bisa dilangsungkannya suatu pemilihan umum.

Anggota KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung *Schouwburg*, Jakarta dan dilanjutkan dengan persidangan pertama, yang dipimpin oleh ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo juga di gedung yang sama. Namun mengingat keterbatasan tempat, Seketariat KNIP terpaksa berada di tempat terpisah, mereka menempati bekas Gedung Jawa *Hookoakai* didekat Lapangan Banteng. Kelangkaan gedung yang memadai pada masa itu serta masih belum mantapnya penyelenggaraan pemerintahan, menyebabkan tempat persidangan KNIP harus



Komplek Gedung DPR/MPR di lihat dari depan

selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini berarti, harus selalu berpindah-pindah tempat.

Sidang kedua KNIP, tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, diselenggarakan di bekas Hotel *Binnenhof*, di jalan kramat raya. Selanjutnya pimpinan KNIP diserahkan kepada Sultan Sjahriir. Selama berlangsungnya persidangan, mereka menyadari kesulitannya mengumpulkan anggota KNIP. Di samping itu, hal yang paling



Bangunan di jalan Cilacap



Gedung Schouwburg, Sekarang Gedung kesenian Jakarta

esensial pada saat itu adalah munculnya keinginan untuk bisa menegaskan prinsip pembagian kekuasaan dalam negara, agar negara Republik Indonesia bisa diakui oleh masyarakat dunia, bahwa Indonesia manjukung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.

Kenyataan tersebut mendorong diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks), dimana antara lain menyebutkan. "Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan Garis-Garis Besar Haluan

Negara.” Kecuali itu, disetujui pula keputusan, “... pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari, berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Berdasar maklumat tersebut, hanya selang satu hari sesudahnya, Komite Nasional Indonesia Pusat membentuk badan pekerja, nantinya lebih dikenal dengan singakatan BPKNIP, yang terdiri dari 15 anggota dengan Ketua Sutan Sjahrir. Pada sidang kedua tersebut, Sekretariat KNIP menggunakan bangunan di jalan Cilacap.

Salah satu persoalan penting yang tampil sebagai topik pembicara dalam persidangan BPKNIP pada minggu-minggu pertama revolusi adalah, bagaimana memperbaiki pola kepemimpinan negara. Dua macam aliran tercermin selama berlangsungnya perdebatan. Kelompok pertama meminta agar lembaga kepresidenan diganti dengan bentuk presidium, yang akan terjadi dari tiga anggota. Kelompok kedua tetap mempertahankan lembaga kepresidenan.

Dengan syarat, sistem kabinet presidensial diubah menjadi kabinet parlementer. Presiden hanya berperan sebagai lambang persatuan, sedangkan kepala pemerintahan akan dipimpin seorang perdana menteri.



*Sidang ke empat KNIP
di gedung Republik Indonesia
Solo, Jawa Tengah,
28 Febuarui sd. 3 Maret 1946*



Gedung Loge Theosofie di jalan Malioboro Yogyakarta



Gedung Societret Concordia Malang, Jawa Timur. Sidang KNIP berlangsung disini pada tanggal 25 April sampai dengan 6 Mei 1947



Sidang ke -6 KNIP sampai 15 Desember 1949 di Sithinggil, Keraton Yogyakarta



Kraton Yogyakarta

Dalam pemungutan suara, kelompok pertama mengalami kekalahan. Dengan demikian, kedudukan Soekarno tetap sebagai Presiden, hanya saja kabinetnya harus diganti baru. BP KNIP kemudian menunjuk Sultan Sjahrir, selaku formatur untuk menyusun kabinet baru. Terbentuknya kabinnet parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri membuktikan tekad pemerintah Indonesia untuk menjamin belangsungnya prinsip kedaulatan rakyat.

Secara bertahap, dimulailah pembagian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selanjutnya KINP menunjuk Soepeno sebagai ketua sementara. Mengingat KNIP masih belum mempunyai gedung tetapyang bisa dijadikan tempat persidangan, sidang-sidang terpaksa berpindah tempat. Sidang ketiga pada tanggal 25 sampai 27 November 1945 menem-pati sebuah gedung di jalan Pangeran Diponegoro, di depan gedung CBZ (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo). Gedung bekas tempat persidangan ketiga tersebut

sekarang dipakai oleh SMA PSKD.

Selama tiga kali persidangan, KNIP hanya berpindah tempat di dalam kota Jakarta. Tetapi sidang selanjutnya beralih kekota lain. Sidang keempat KNIP, tanggal 28 Februari sampai 3 Maret 1946, diselenggarakan di gedung Republik Indonesia di Solo (Jawa Tengah). Selanjutnya, BP KNIP beserta sekretariatnya, pindah ke Purworedjo (Jawa Tengah), menem-pati gedung bekas Hotel *Van Laar* di jalan Kutoardjo (sekarang Jalan Jendral Soedirman). Alasan kepindahan ke Purworedjo untuk mendekati Pemerintahan Pusat yang saat itu berada di Yogyakarta, dan karena belum mendapat tempat di Yogyakarta, maka ketika itu Bupati Purworedjo menawarkan BP KNIP untuk menem-pati gedung bekas Hotel Van Laar.

Kemudian, persidangan kelima BP KNIP, tanggal 25 Februari sampe 6 Maret 1947, berlangsung di gedung bekas *Societeit Concordia* di Malang (Jawa Timur). Dalam persidangan tersebut, Mr. Assaat bertindak sebagai ketua. Sesudah persidangan di

Malang, pertengahan Maret 1947 BP KNIP beserta sekretariatnya pindah ke Yogyakarta, dan untuk sementara waktu, lebih kurang satu bulan, menempati gedung Palang Merah Indonesia di jalan Gondolayu, Yogyakarta.

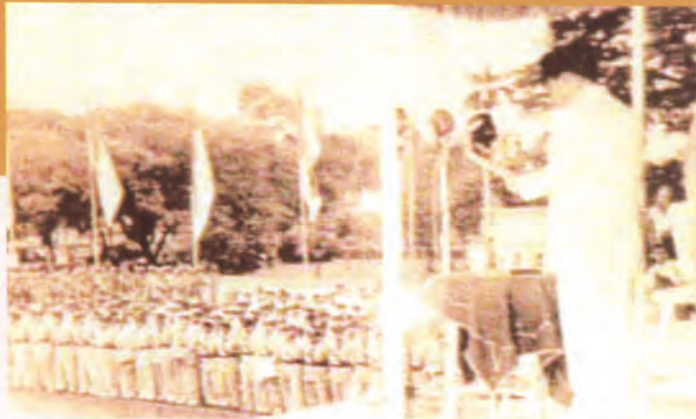
Berlainan dengan tempat keberadaan sekretariatnya, rapat-rapat awal BP KNIP diselenggarakan di rumah salah seorang bangsawan disekitar Pasar Ngasem, di lingkungan keraton Yogyakarta. Kemudian kegiatan rapat serta Sekretariat BP KNIP sejak pertengahan April 1947 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1950 mendapatkan tempat tetap di gedung *Loge Theosofie*, di jalan Malioboro, Yogyakarta. Sementara berkedudukan di Gedung *Loge Theosofie* itu, berlangsung sidang keenam KNIP tanggal 6 sampai 15 Desember 1949 di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta.



*Hotel des indes,
sekarang di bekas
tempat itu berdiri
pusat pembelanjaan
Duta Merlin*



Persidangan para anggota konstituente diselenggarakan di gedung bekas Societeit Concordia di Bandung, Jawa Barat



Pembacaan dekrit presiden di istana negara tahun 1959. Jakarta

Sebagai pelaksanaan dari hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar, sejak akhir Desember tahun 1949 diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Berdasarkan Konstitusi RIS ini, Parlemen RIS yang diketuai oleh Mr. Sartono mengadakan sidang pertama di sebuah gedung di jalan Wahidin, Jakarta. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1835 dan diberi nama *Societeit Concordia*, berfungsi sebagai tempat hiburan serta tempat pertemuan para opsir Belanda. Sesudah mengalami berbagai perbaikan, bangunan ini oleh pemerintah RIS diresmikan namanya menjadi Gedung Parlemen. Di tempat tersebut sekarang berdiri Gedung Kementerian Keuangan.

Sayang sekali, setelah upacara pembukaan tanggal 16 Februari 1950, gedung baru tersebut agaknya masih belum layak digunakan sebagai tempat persidangan. Rapat-rapat perlemen selama dua minggu terpaksa dilangsungkan di lantai atas Hotel *Des Indes*, sekarang Pusat Perbelanjaan Duta Merlin.

Situasi negara yang baru saja lepas dari perang kemerdekaan menyebabkan perlaksana pemilihan umum sebagai satu langkah untuk menampung kehendak rakyat tidak bisa berlangsung secepat yang diharapkan. Barulah kemudian, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pemilihan umum memilih anggota parlemen dan anggota



Pembukaan SU III MPRS di gedung merdeka 1965 di Bandung, Jawa Barat

konstituante bisa dilangsungkan pada pertengahan tahun 1955. Sebagai akibat dari masih terbatasnya gedung-gedung milik pemerintah, selama itu para wakil rakyat tidak bisa hanya melakukan persidangnya dengan berpindah-pindah tempat dalam satu kota, tetapi bisa juga berlainan kota. Pengalaman tersebut pernah dialami oleh para anggota DPR hasil pemilu 1955. Mereka harus bersidang di Jakarta sedangkan tempat persidangan para anggota Konstituante terpaksa diselenggarakan di gedung bekas *Societeit Concordia* di Bandung, Jawa Barat.

Walaupun sudah berusaha dengan sungguh-

sungguh, para anggota Konstituante ternyata mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan mengenai bentuk dasar negara. Mereka juga tidak berhasil merumuskan lahirnya sebuah undang-undang dasar baru. Bahkan juga gagal menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia. Kegagalan tersebut mendorong Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Agar bisa memenuhi ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945, maka melalui ketetapan Presiden No 2/159, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Disusun kemudian oleh pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan Penetapan Presiden No 3/1959. Dengan demikian, semua kelengkapan negara seperti dimaksud oleh UUD 1945 telah terpenuhi, walaupun sebagian terbesar dari kelengkapan negara tersebut, yaitu MPR, DPR, DPA, dibentuk melalui Penetapan Presiden.

Dalam perkembangan selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 akhirnya dibubarkan lewat penetapan Presiden No 3/1960, karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya, dengan penetapan Presiden No 4/1960 tanggal 24 Juli 1960 Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang diketuain

oleh H. Zainul Arifin. Persidangan DPPR-GR selama beberapa tahun masih tetap menggunakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat lama.

Sidang Umum pertama MPRS diselenggarakan pada bulan November tahun 1960. Sidang umum kedua bulan Mei tahun 1963 dan sidang Umum ketiga pada bulan April 1965. Ketiga persidangan tersebut berlangsung di Gedung bekas *Konsituente*, yaitu gedung *Soiceit Concordia* di Bandung, yang waktu itu sudah diganti namanya menjadi gedung

merdeka. Gedung tersebut merupakan gedung bersejarah, karena pada pertengahan bulan April 1955 pernah digunakan sebagai tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika.

Pada tahun 1964, pimpinan DPR GR yang diketuai oleh H. Arudji Kawrtawinata bermaksud meremajakan bangunan tempat persidangan. Rencana ini mulai dilaksanakan pada tahun 1965 oleh panitia Antar Departemen. Selama proses peremajaan berlangsung, sejak bulan Februari 1965, DPR GR



*Gedung DPR GR
(bangunan bekas millk KUPAG) ditempat itu
sekarang berdiri gedung kantor MENPORA
Jakarta*



berikut sekretariatnya pindah ke kompleks senayan, menempati bangunan semi permanen dari bekas milik komando Urusan Pembangunan Asian Games (KUPAG). Bangunan darurat tersebut telah diperluas khusus untuk bisa menampung secara agak memadai aktivitas para anggota DPR GR.

Sebelumnya pernah direncanakan, bangunan darurat tepat persidangan DPR GR di Senayan

*Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Nama baru untuk gedung perlemen disamping
Lapangan banteng*

hanya akan ditempati sekitar dua tahun, sambil menunggu selesainya peremajaan gedung lama di dekat Lapangan Banteng. Tetapi tanpa terduga pada tanggal 30 September 1965 pada malam hari meletus peristiwa G30S/PKI. Peristiwa tersebut, dengan segala macam eksensya, meyebabkan

usaha pemugaran gedung DPR terpaksa berhenti. Oleh karena pada saat itu gedung sementara DPR GR di kompleks Senayan juga masih belum mempunyai ruangan untuk bisa menampung persidangan pleno, maka penyelenggaraan rapat-rapat pleno terpaksa memanfaatkan gedung basket. Sedangkan penyelenggaraan sidang umum MPRS keempat tahun 1966 dan sidang Istimewa MPRS tahun 1967, karena kelangkaan tempat juga terpaksa berlangsung di GEDUNG istana Olah Raga. Tempat persidangan tersebut semuanya berada di kompleks Gelanggang Olah Raga, Senayan, Jakarta.

Sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara, selama ini tempat persidangan para wakil rakyat dalam aktivitasnya untuk bisa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, sangat memprihatinkan. Semangat perjuangan yang terus berkobar pada awal perang kemerdekaan, menyebabkan tidak ada yang menyadari bahwa bangunan-bangunan yang digunakan untuk sidang-sidang KNIP sama sekali tidak memadai.

Begitu pula ketika perang kemerdekaan telah selesai dan pengakuan kedaulatan terhadap negara Indonesia sudah datang, pemerintah masih juga tetap belum mampu menyediakan suatu tempat yang layak untuk persidangan para wakil rakyat.

Malahan dalam tahun-tahun berikutnya, ketika berbagai proyek mercusuar direncanakan dan sebagian sudah mulai digarap, belum pernah terlintas pemikiran untuk membangun kawasan khusus yang bisa digunakan oleh lembaga perwakilan rakyat, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara.

Selama perjalanan waktu, sejak KNIP pertama kali dibentuk untuk bisa membuktikan kepada mata dunia bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, sampai kepada masa persidangan MPRS/DPR GR, tidak kurang lima belas kali para wakil rakyat berpindah tempat dan berpindah kota. Tidak hanya terpisahnya tempat sekretariat dan lokasi persidangan, malahan pernah terjadi, tempat persidangan antara anggota MPRS dengan anggota DPR tidak berada dalam satu kota.

Ada kalanya, mereka menggunakan tempat persidangan dalam bangunan mirip gudang. Seperti pernah terjadi, ketika sidang-sidang DPR GR terpaksa harus memanfaatkan bangunan darurat bekas pakai pesta olahraga Asian Games. Ketidaknyamanan pelayanan kepada para anggota MPR/DPR semacam inilah yang ingin di akhiri oleh pemerintah Orde Baru.



Sejumlah kepala negara sahabat turut serta melakukan pemahangan tiang pertama proyek political venues tanggal 19 April 1965.

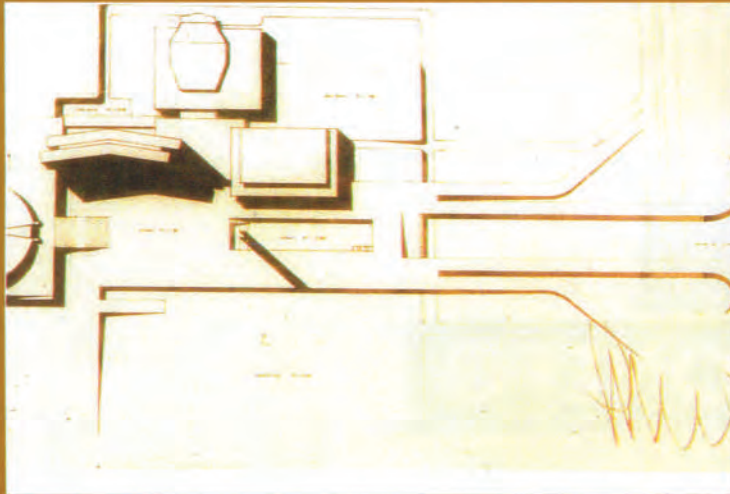


DIAWALI

PROYEK CONEFO

Semangat revolusioner sering bisa berkobar secara amat dinamis. Prakasa Indonesia untuk membantu mewujudkan sebuah dunia baru yang bebas dari penjajahan sudah sejak awal tertulis pada pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan, sehingga hanya dalam waktu sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia tampil memprakarsai terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika. Pertemuan tersebut berlangsung sejak tanggal 18 - 24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat.

Sebanyak 29 negara dari dua benua, Asia dan Afrika, mewakili lebih dari separuh umat manusia di dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa duduk bersama dan bertemu muka. Para wakil ke-29 negara berdaulat ini mempersatukan tekad untuk berjuang menghapuskan segala macam bentuk penjajahan. Semangat Bandung, seperti yang telah dirumuskan dalam Konferensi Asia-Afrika, segera berkobar ke seluruh penjuru dunia. Semangat



*Site plan gedung conefto
karya pemenang sayembara.*

tersebut menyulut api perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Perjuangan tersebut akhirnya bisa meruntuhkan kekuasaan kolonial dan melahirkan negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat. Terjadilah sebuah perubahan global. Situasi di seluruh dunia tidak lagi seperti ketika masa akhir Perang Dunia II, menjelang saat pembentukan PBB. Situasi global yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia pada pertengahan tahun 60-an, mendorong pemerintah Indonesia untuk

melaksanakan secara tegas amanat yang tercantum pada alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 baru saja diberlakukan kembali di Indonesia lewat Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Khususnya, gagasan dari para pendiri bangsa untuk menghapuskan segala macam bentuk penjajahan diatas muka bumi, sebagaimana telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945."... bahwa

sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karna tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. " dengan tetap mengacu kepada isi Pembukaan UUD 1945, upaya Indonesia untuk menampung semangat revolusioner diterjemahkan dengan melahirkan gagasan untuk menyelenggarakan *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo) di Jakarta.

Konferensi internasional dari sejumlah negara yang mendukung gagasan membentuk tata dunia baru. Sebuah langkah terobosan yang sudah pasti akan berhadapan langsung dengan PBB, dimana sejak awal tahun 1965. Pemerintah Indonesia sudah memelopori perombakan organisasi dunia tersebut.

Tanggal 8 Maret 1945, dengan semangat revolusioner yang selalu berkobar, melalui Surat Keputusan Presiden RI No 48/1965 Presiden Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) untuk melaksanakan pembanguna proyek political venues di Jakarta. Proyek tersebut bakal melengkapi proyek olahraga yang sudah sempat dibangun semasa penyelenggaraan kegiatan pesta olahraga se-Asia, Asian Games. Dalam upaya inilah, letak lahan yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan proyek *political venues* hanya bersebelahan dengan kompleks *sport venues* di Gelanggang Olah Raga Senayan. Kedua

venues yang bakal saling menunjang tersebut malahan hanya dipisahkan oleh sebuah jalan, kedua-duanya sama-sama terletak di tepi Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut pertimbangan Keppres 48/1965, pembangunan kompleks tersebut dinyatakan, "... untuk kepentingan penyelenggaraan konperensi-konperensi internasional dibidang politik dalam rangka penggalangan persatuan bangsa-bangsa, terutama di negara-negara *The New Emerging Forces*, perlu dibangun political venues di Jakarta, (Indonesia), yang sesuai dengan kepribadian Indonesia."

Salah satu yang menarik dalam surat keputusan di atas adalah ketentuan tambahan, proyek raksasa tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Dengan pencantuman batas akhir rencana pembangunan seperti itu, berarti hanya tinggal tersisa waktu sekitar 17 bulan untuk menyelesaikan pembangunan. Sehingga tidak mengherankan, sebagai pihak penerima pelimpahan tugas untuk menjadi penanggung jawab pembangunan proyek, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT), Soeprajogi, pada tanggal yang sama dengan dikeluarkannya Keppres 48/1965, segera menertibkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No 6/PRT/1965 tentang komando pembangunan Proyek *Conefo* disingkat Kopronef.

Peraturan yang seketika itu juga langsung dikeluarkan oleh Menteri PUT antara lain menyebutkan, "... mengingat sangat mendesak dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, perlu dimobilisir segala dana dan daya supaya pembangunannya dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu sebelum tanggal 17 Agustus 1966, sebagaimana dikomandokan oleh Presiden Republik Indonesia,"

Untuk lebih menjelaskan tentang peraturan menteri ini, dinyatakan bahwa, "Proyek Conefo adalah proyek pembangunan *political venues* yang terdiri dari beberapa bangunan/konstruksi, lengkap dengan isinya (interior, dekorasi, *meubeulair*) dan *landscaping* menurut gambar rencana yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia."

Perlu dimaklumi, pada saat itu yang selalu tampil adalah semangat revolusioner, semangat tersebut terasa merata disemua bidang sebagai salah satu dampaknya, isi Pasal 5 Peraturan Menteri PUT tentang Proyek Conefo menegaskan, "Komando Proyek diberi wewenang untuk atas kuasa Presiden :

- a. Memobilisir dan menggunakan aparaturnya Pemerintah Pusat dan Daerah yang ada hubungannya dengan dan yang diperlukan untuk pembangunan proyek.
- b. Mengadakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi pemerintah (sipil dan militer) serta swasta menurut keperluan.

- c. Mengikutsertakan/mengerahkan perusahaan negara, perusahaan swasta yang progresif dan masyarakat dalam pekerjaan pembangunan proyek.
- d. Menetapkan kebijaksanaan dan mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk kepentingan Proyek Conefo, dengan memperhatikan kebijaksanaan umum pemerintah dan hukum yang berlaku."

Dalam semangat revolusioner dan suasana tergesah-gesa, pelaksanaan Proyek Conefo disusun bagaikan sebuah organisasi militer. Pelaksanaan proyek tersebut dengan istilah komando dan dipimpin langsung Menteri PUT dengan kedudukan sebagai komandan. Dalam melaksanakan tugasnya, komandan dibantu oleh 4 orang Deputi dan setiap Deputi disertai tugas untuk memimpin sebuah tim kerja tertentu.

Berdasar pembagian tersebut, komando proyek memiliki 4 kesatuan operasional berbentuk tim kerja. Terdiri dari tim I, perencanaan dan pengawasan teknik; Tim II keuangan dan pembiayaan; Tim III, logistik dan Tim IV pelaksanaan. Setiap tim kerja terdiri dari minimal tiga dan maksimal lima anggota inti, tim dipimpin oleh seorang Deputi sebagai ketua merangkap anggota. Dan seandainya ketua bersangkutan berhalangan, tugasnya bisa diwakili oleh seorang wakil ketua.

Melalui tata organisasi semacam ini, dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa mensukseskan Proyek Conefo, komandan proyek bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Indonesia.

Tanggal 19 April 1965, dengan upacara semarak yang dihadiri oleh berbagai perwakilan negara-negara asing, tepat pada peringatan ulang tahun ke sepuluh Konferensi Asia-Afrika, dipacangkanlah tiang pertama pembangunan proyek *Political Venues* di Jakarta.

Sekarang, terbentang tantangan yang harus bisa dijawab oleh para teknisi Indonesia. Merancang dan sekaligus melaksanakan pembangunan kompleks *Political Venues* raksasa untuk menghimpun segala

kekuatan-kekuatan, yang datang dari seluruh penjuru dunia. Sebuah bangunan konferensi dengan peragam penyediaan pelayanan, fasilitas, kenyamanan dan kemegahan.

Sesuai dengan permintaan Bung Karno, kompleks bangunan yang baru dibangun harus memiliki ciri khas kepribadian Indonesia. Tetapi sebaliknya, bangunan-bangunan tersebut juga harus sanggup menjawab datangnya tantangan zaman selama beberapa tahun kedepan. Dilengkapi persyaratan tambahan lain, Proyek Conefo wajib menampilkan kemegahan. Semata-mata agar bisa diketengahkan sebagai sebuah teladan, tentang keunggulan karya rancang bangun para teknisi Indonesia.



Gedung DPR/MPR RI dari depan

RANCANG BANGUN INDONESIA

Keputusan untuk mulai membangun Proyek Conefo dilakukan pada tanggal 8 Maret 1965. Tetapi sebelum ini, sekitar bulan November 1964 pemerintah Indonesia telah membuka sayembara untuk rancangan bangunan kompleks dimaksud. Menurut catatan, sayembara ini diikuti tiga perusahaan konsultan perencanaan, yakni Binakarja, Virama karja, dan Parentjana Djaja, di samping datang peserta perseorangan, dalam hal ini Soejoedi Wirjoatmodjo Dipi. Ing. Sebelumnya, peserta terakhir malahan tidak ingin mengikuti sayembara. Bahwa Soejoedi pada akhirnya ikut juga memasukkan karya rancangannya, sebenarnya datang atas dorongan Menteri PUT Soeprajogi.

Masyarakat dan juga Menteri PUT, telah mengetahui prestasi arsitek Soejoedi, khususnya dalam kerjasamanya dengan Ir. Sutami, seorang teknisi muda usia yang pada waktu itu sangat handal untuk menghitung konstruksi bangunan. Kerjasama antara kedua tokoh ini dalam tim konsultan perencanaan teknik sudah menghasilkan berbagai bangunan.



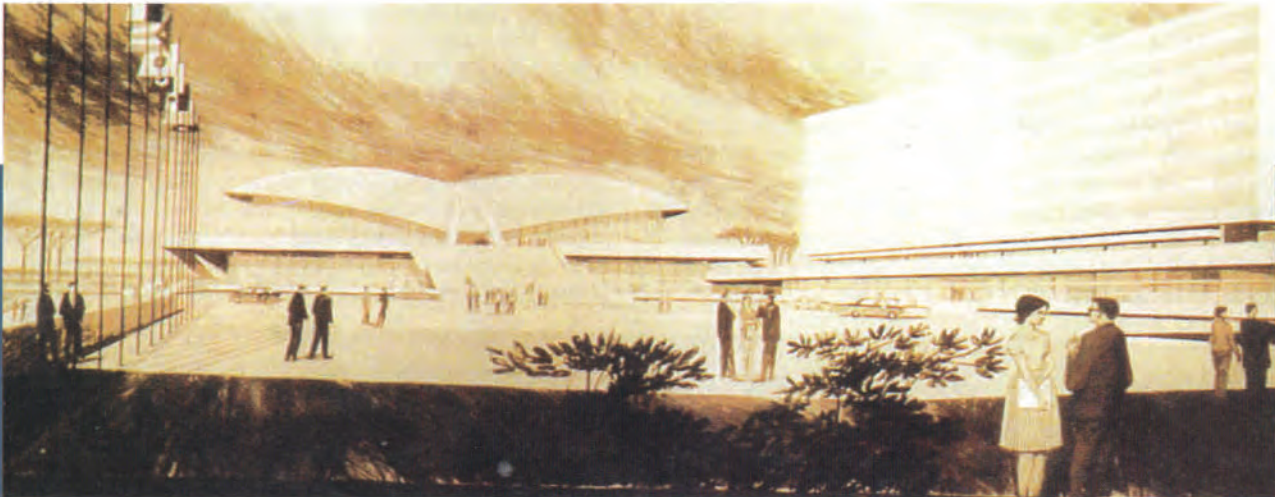
Empat massa bangunan terpisah. main conference building. –secretariat building. – auditorium. – banquet hall.

Diselenggarakannya sayembara untuk merancang Gedung Conefo merupakan kesempatan langka bagi para konsultan teknik serta arsitek Indonesia. Inilah, untuk pertama kalinya, terbuka sebuah kesempatan guna menggarap dengan tuntas suatu bangunan berskala raksasa. Kesempatan untuk merancang bangunan besar multi tingkat ini harus sanggup menandingi kemegahan sebuah gedung yang selama ini telah menjadi tumpuan pandangan masyarakat dari seluruh dunia, gedung PBB di *New York*, Amerika Serikat.

Dengan demikian, sayembara tersebut juga membuka kesempatan untuk bisa menampilkan karya cipta bercirikan Indonesia di panggung rancang bangun dunia. Kesempatan tersebut semakin terasa menantang, mengingat adanya batasan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan penggarapan proyek. Apalagi, dengan masih terbatasnya tenaga tehni Indonesia yang pada saat itu tersedia di lapangan, masih belum adanya pengalaman untuk menggarap pekerjaan serba raksasa semacam itu, dilengkapi keterbatasan tingkat teknologi rancang



Suasana arkada yang terletak dibawah permukaan tanah berdasarkan rancangan asli. Kegiatan sehari-hari dalam kompleks sebetulnya berlangsung ditempat ini dengan latar belakang gedung-gedung yang nampak semakin anggun. Pembangunan arcada ini dibatalkan dan diganti dengan kolam air mancur. Suasanaupun berubah sama sekali.



Suasana diatas arkada dari rancangan asli, diwarnai oleh keteduhan bagi para peserta konferensi

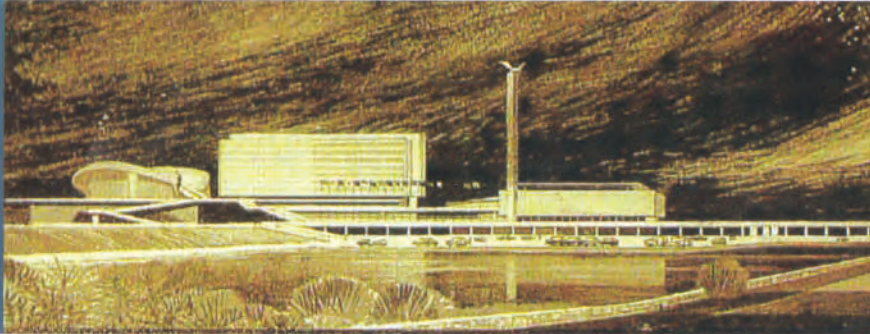
bangun serta sarana yang pada waktu itu sama sekali memang masih belum memadai. Dengan demikian, batasan waktu satu tahun untuk menyelesaikan proyek ini, merupakan kendala tersendiri yang sejak awal sewajarnya harus ikut diperhitungkan.

Ternyata, hanya dalam tempo dua minggu, hasil sayembara pembangunan kompleks bangunan *political venues* di Jakarta telah diumumkan. Dengan sebuah kesepakatan bulat, tim penilai yang dipimpin langsung oleh Bung Karno, menetapkan karya rancang Soejoedi sebagai pemenang. Rancangan Soejoedi berhasil memenangkan sayembara ini mungkin karena karya tersebut merupakan satu-satunya rancangan yang dilengkapi maket.

Sehingga, sadar atau tidak, keberadaan sebuah maket sangat memudahkan tim penilai dalam memahami wujud tiga dimensi, bagaimana bentuk bangunan setelah selesai dikerjakan.

Sesuatu yang memang cukup sulit dinampakan, seandainya hanya lewat kertas-kertas berisikan gambar-gambar teknis. Karya tersebut memenangkan sayembara, karena dalam

Persoalan mengenai kendala waktu, oleh Soejoedi atas saran Sutami, diselesaikan dengan memecah kompleks bangunan yang digarapnya dalam empat unit. Terdiri dari bangunan ruang sidang utama,



Rancangan asli dari soejoedi, tampak keseluruhan dari arah jembatan semanggi dari gambar ini terlihat danau buatan yang direncanakan sebagai pemantul sehingga seluruh kompleks tampil kembali lewat bayangan dipermukaan danau, nuansa ini terlupakan sama sekali ketika pembangunan dilanjutkan dalam periode orde baru sehingga komplek MPR/DPR sekarang hanya terlihat dari jalan masuk utama.

pelaksanaan pembangunannya, bisa dikerjakan secara terpisah-pisah. Dengan demikian, setiap unit bangunan meskipun nantinya setelah rampung bakal saling terkait, dalam tahap penyelesaian bisa dikerjakan terpisah. Hal ini menjadikan proses pengerjaannya tidak harus saling menunggu atau saling mengganggu. Penggarapan secara terpisah tersebut agaknya mutlak menjadi bahan pertimbangan, mengingat ketentuan mengenai batas untuk menyelesaikan proyek pembangunan ini yang harus bisa dirampungkan dalam waktu teramat singkat.

gedung sekretariat, auditorium, dan gedung resepsi. Pada tahap penyelesaian akhir, keempat unit bangunan tersebut akan dotampilkan dalam sebuah kesatuan utuh. Namun selama dalam proses pembangunan, setiap unit bisa dikerjakan secara bersamaan oleh kontraktor yang berbeda, tanpa harus tergantung pada penyelesaian di unit lain.

Selain itu, keharusan untuk menampilkan ciri kepribadian Indonesia merupakan satu unsur penting yang wajib diperhitungkan dalam menggarap kompleks bangunan ini. Jawaban Soejoedi untuk bisa memenuhi

kriteria tersebut dengan selalu menyediakan ruang luas di bagian depan untuk menerima dan menyambut kedatangan para tamu. Ruangannya semacam ini merupakan bagian dari bangunan yang ikut mencirikan semangat kepribadian nasional, senantiasa akrab dalam menyambut para tamu.

Kecuali itu, disediakan pula fasilitas pelayanan di seluruh kompleks. Upaya tersebut diharapkan menampilkan ciri khas pelayanan gaya Indonesia yang selalu memiliki kehangatan, sehingga seluruh pengunjung serasa berada di tempat tinggalnya sendiri. Hal ini bakal diwujudkan dalam bangunan gedung resepsi untuk menyelenggarakan jamuan kenegaraan, barikut tambahan gedung auditorium yang dirancang bisa menampilkan berbagai macam pertunjukkan kesenian dari seluruh Nusantara.

Di samping detil-detil rancangan di bagian dalam bangunan utama yang terkesan serba cermat dengan memperhitungkan segala aspek, Soejoedi juga tidak melupakan sentuhan khusus terhadap bagian luar bangunan. Sentuhan tersebut terlihat pada gagasannya untuk menampilkan tangga utama yang serba luas dan terbuka lebar, menampilkan salah satu tradisi Indonesia, sarat keramahan dalam menyambut para tamu. Tangga utama serba terbuka ini akan mengantar seluruh pengunjung langsung menuju ruang sidang utama tanpa harus melewati gangguan secara berarti. Kecuali tentu saja, untuk para tamu VIP, dengan mengingat ber-

bagai macam persyaratan protokoler serta securitynya, mereka akan bisa memasuki ruang sidang utama tanpa harus melewati tangga terbuka.

Tangga utama menandai terpisahnya ruang sidang utama dengan berbagai ruang pendukung yang berada di lantai bawah. Di lantai bawah disediakan lima ruangan untuk sidang komisi serta dua ruangan cadangan. Lantai tersebut dilengkapi bangsal masuk utama, lobi, ruangan makan, serta beragam fasilitas penunjang lain. Malahan, agar bisa menandingi gedung PBB di *New York*, kompleks political venues di Jakarta dilengkapi ruangan pusat media berikut arkada perbelanjaan.

Dengan rancangan semacam itu kompleks bangunan tersebut diharapkan bisa akrab di hati setiap pengunjung. Di tempat ini segala macam pelayanan tersedia dan semua kenyamanan lengkap tersaji.

Ini semua dilakukan agar secara keseluruhan kawasan tersebut mampu tampil secara mandiri. Sanggup tumbuh memasyarakat, bagaikan pertumbuhan sebuah pasar tradisional berciri khas Indonesia. Tempat segala macam warga masyarakat hadir, bertemu muka, saling berbincang-bincang dan juga untuk menampung segala macam informasi berikut tempat merumuskan beragam keputusan-keputusan kenegaraan.



BERAGAM KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN

Sebuah bangunan, betapapun indahny, pasti tidak akan banyak artinya jika tidak mudah dijangkau oleh masyarakat calon penggunanya. Sesuai dengan luasnya lahan yang telah tersedia, kompleks bangunan ini diharapkan bisa dicapai lewat sebuah jalan utama sekitar satu kilometer dari jalan utama sekitar satu kilometer dari arah Jembatan Semanggi. Para calon pengunjung juga bisa mempersiapkan diri sebelum mencapai bangunan utama, melewati sebuah halaman luas dibagian depan serta menyusuri danau buatan multi guna.

Danau buatan dirancang untuk ikut serta menunjang keindahan lingkungan. Jika cuaca memungkinkan, bayangan serta bentuk bangunan akan bisa memantul dengan elok ke permukaan air danau yang bersih

berkilau. Dengan demikian, terkesan hadirnya sebuah bangunan monumental tetapi tetap akrab dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, selain dilihat dari segi keindahan, danau buatan tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai saluran-akhir dalam pengaturan tata-air di seluruh kompleks.

Letak Proyek Conefo semula ditetapkan dengan batas-batas sebagai berikut: disebelah utara berbatasan Jalan Jendral Gatot Soebroto, kemudian sebelah Timur Jalan pintu IV (Sekarang Jalan Gerbang Pemuda), sebelah Selatan dengan batas jalan Terusan Pasar Palmerah (Sekarang Jalan Lapangan Tembak) dan batas Barat sebelah rel kereta api.

Di samping rencana pengaturan pembatasan yang sudah jelas tersebut, pernah terlintas pemikiran untuk memindahkan bangunan Gedung TVRI ke wilayah lebih ke Selatan Jakarta. Pindahan ini dengan harapan agar radius daya pancar yang bisa dijangkau oleh Siaran TVRI semakin efisien. Mengenal kawasan yang sekarang ini digunakan untuk Taman Ria Remaja, pada awalnya telah dirancang sebagai sarana teknis pengaturan tata air untuk keseluruhan kompleks dengan titik pandang utama ke Gedung Conefo. Titik pandang tersebut diatur lewat taman tembus pandang yang memantul di danau buatan yang akan dibuat di tempat itu.

Untuk menuju ke kawasan proyek ini, poros masuk jalan utama dibuat bersilangan secara tegak lurus dengan Jalan Jendral Gatot Soebroto. Telah direncanakan, pada titik persilangan akan dibangun jalan layang setengah semanggi untuk mencegah munculnya kemacetan arus lalu lintas. Rancangan jalan semacam ini dilakukan untuk mencegah arus peserta pertemuan, seandainya mereka secara serentak harus keluar-masuk ke kompleks. Malahan, juga dirancang berbagai macam jalan alternatif, yang bisa dipakai oleh para pengunjung seandainya mereka harus meninggalkan kompleks ini sebelum acara selesai.

Sejak awal, sesuai dengan kandungan pesan yang menjiwai pembangunannya, konsep Proyek Conefo berlainan sama sekali dengan rancangan Gedung PBB. Di sana, sesuai dengan sifat individual masyarakat barat dan juga cuaca setempat yang sering kali bisa kurang menguntungkan, perancangannya sama sekali tidak membuka kesempatan untuk diselenggarakannya ucapan prosesi. Sebaliknya, setiap pengunjung dengan cepat akan segera dibawa masuk kedalam ruang bangunan utama. Tetapi pada kawasan political venues di Jakarta, main conference building justru diletakan pada poros utama. Kecuali itu, masih terdapat jarak sekitar 500 meter yang memisahkan jalan masuk utama sebelum pengunjung datang ke tangga masuk. Jarak dengan luasan sekian memberikan ruang gerak

cukup leluasa. Keleluasaan ruang tersebut akan bisa memungkinkan diselenggarakannya berbagai macam prosesi protokoler.

Sentuhan terhadap lingkungan di sekitar kompleks juga tidak diabaikan. Padang rumput, pepohonan serta danau buatan yang ada dikawasan ini ikut disatukan untuk bisa menunjang kebutuhan konsep. Halaman luas, dengan meletakkan bangunan utama, di bagian tengah, bakal menjadikan kesejukan iklim tropis Indonesia bisa dinikmati secara optimal. Pendekatan manusia semacam ini sejak awal telah tampil selaku salah satu unsur yang ingin ditonjolkan dalam rancangan pembangunan kawasan tersebut. Dalam artian, tidak akan digunakan tiang-tiang raksasa sebagai penopang bangunan. Penggunaan seminim mungkin tiang sudah pasti membuahakan kendala tersendiri dalam perhitungan kekuatan bangunan. Tetapi, konsep pendekatan manusiawi tersebut ingin diterapkan, sekalipun untuk ruangan tempat sidang utama yang harus menampung seribu hadirin.

Pada ruang seluas ini, pemakaian tiang-tiang penyanggah bangunan tetap tidak akan dihadirkan. Pada pandangan luar bangunan, sebagai pengganti penggunaan jajaran tiang-tiang besar mencekam

yang kurang manusiawi, perancangnya secara sengaja menghadapkan pengunjung pada kombinasi bidang-bidang dinding dan kaca, dengan aksentuasi garis-garis horisontal pada kerangka pintu berikut jendelanya. Disamping itu, dilakukan pemanfaatan garis-garis horisontal untuk menandai lantai maupun atap bangunan. Pelataran teras lantai dua yang menjadi atap lantai satu malahan sengaja dibuat agak maju kedepan. Dengan demikian, atap yang maju tersebut bisa berfungsi selaku pelindung bangunan dari terik matahari sekaligus mampu memberikan sekeदार peneduh kepada mereka yang datang ke dekat bangunan.

Untuk mempercantik lingkungan sekeliling, di sekitar kawasan ditampilkan taman-taman pada atap beberapa bangunan. Taman-taman buatan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan interaksi positif yang sejuk antara masyarakat pengunjung dengan segala bangunan dengan kawasan tersebut. Melalui upaya semacam ini, diharapkan seluruh kawasan dan khususnya semua bangunan dalam lingkungan bisa tampil menyatu dengan alam sekitarnya. Ia bukan tumbuh sebagai sebuah bangunan asing, yang berdiri sendirian terpisah dari lingkungan sekitarnya.



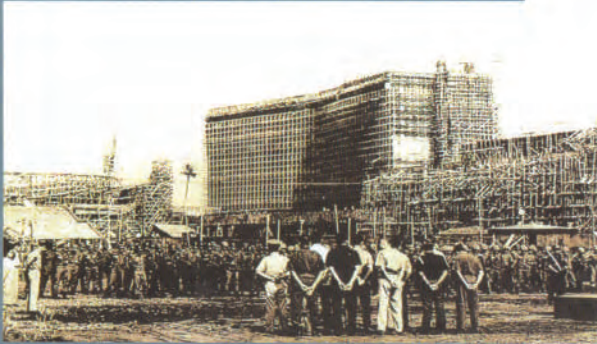
Sebagian anggota Tim pelaksana pembangunan Proyek Conefo

PENGGEMBLENGAN SDM TEKNIK BANGUNAN

Surat keputusan Presiden secepatnya melaksanakan Proyek Conefo, pada kenyataan berhadapan dengan keterbatasan kemampuan ahli teknik di Indonesia. Hal ini diperburuk lagi oleh kenyataan, jumlah kontraktor yang mampu membangun gedung bertingkat masih belum banyak. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah Perusahaan Bangunan Negara (eks perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi, sekarang Badan Usaha Milik Negara-BUMN). Kendala tersebut masih dilengkapi oleh tingkat teknologi

rancang bangun yang belum secanggih sekarang ini, ditambah masih minimnya peralatan yang tersedia.

Sebagaimana pernah disebutkan, Soejoedi sejak awal telah merencanakan pembangunan *political venues* secara terpisah. Dengan mengacu kepada rencana tersebut, enam kontraktor kemudian bisa ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan. Secara berturut-turut, PN Utama Karja melaksanakan pekerjaan main conference building. Kemudian PN Adhi Karja menangani



Upacara di lokasi proyek Conefo tanggal 31 Mei 1966 mendekati target penyelesaian



Ir. Sutami selaku penanggung jawab proyek memberikan penjelasan.



Sosok bangunan Main Conference Building/Gedung Sidang Utama ketika konstruksi perancah mulai dibongkar.

penyelesaian gedung sekretariat. PN Nindja Karja untuk pembangunan gedung auditorium berikut banquet hall, PN Waskita Karja menangani penyelesaian pembangunan danau dan plaza, PN Widjaja Karja menggarap pekerjaan instalasi listrik dan PN Peprida menangani segi mekaniknya. Keenam kontraktor perusahaan Negara ini secara bahu-membahu bekerjasama menyelesaikan tugasnya masing-masing, dengan harapan bisa merampungkannya sebelum melewati ketentuan batas akhir tanggal 17 Agustus 1966.

Pelaksanaan pembangunan proyek ini dilakukan dengan sistem *fast track* yang pada saat itu masih merupakan sebuah metode baru di Indonesia. Dengan sistem ini, proses pekerjaan bisa ditangani

secara lebih cepat. Konstruksi dilaksanakan sambil melanjutkan

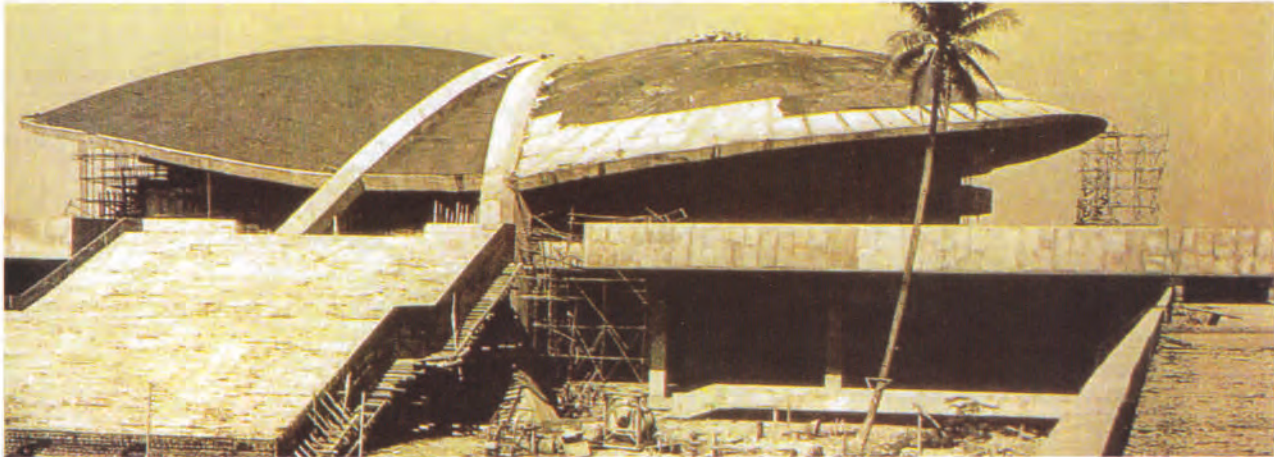
Pengembangan perancangan kompleks, sehingga bakal mampu menjabarkan gagasan-gagasan awal menjadi gambar-gambar yang siap dipakai untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan demikian, proses pembangunannya merupakan pengalaman amat berharga untuk para teknisi Indonesia. Apalagi dengan kenyataan, belasan tenaga dosen dan mahasiswa ikut didatangkan dari hampir seluruh perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknik.

Berbagai macam peristiwa harus dilalui selama proyek ini dirampungkan. Semua kendala tersebut tidak mampu mengganggu penyelesaian pembangunan. Begitu pula dengan goncangnya perekonomian negara, meningginya tingkat inflasi serta bergejolaknya harga bahan-bahan bangunan, sebagai akibat berantai dari kekacauan masyarakat menjelang, pada saat dan beberapa waktu setelah meletusnya peristiwa G30S/PKI tanggal 30 September 1965. Dalam situasi pancaroba semacam itu, pada puncak pekerjaan pernah sekitar 27.000 tenaga dari berbagai macam latar belakang pendidikan, bekerja sama secara bergantian tiga kali dalam waktu dua puluh empat jam, menggarap pembangunan kawasan tersebut. Malahan, untuk bisa menutupi kekurangan tenaga pengawas teknis di lapangan, ikut dikerahkan para dosen dan

mahasiswa ITB Bandung, UGM Yogyakarta serta ITS Surabaya. Salah satu hal yang perlu dicatat dalam sejarah penggarapan proyek ini adalah dipakainya prinsip padat karya. Prinsip tersebut dipilih sebagai akibat tidak langsung dari kenyataan bahwa dewasa itu, tenaga teknisi berpengalaman di Indonesia masih langka. Ditambah dengan masih sederhananya tingkat teknologi setempat, dilengkapi keterbatasan peralatan yang seharusnya mampu membantu penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat, khususnya untuk proses pekerjaan di bagian puncak bangunan. Juga masih belum dimilikinya pengalaman dalam menangani bangunan bertingkat banyak.

Keterbatasan (peralatan) dijawab dengan pengerahan armada semut. Secara beramai-ramai, ribuan pekerja dikerahkan untuk menggarap proyek. Bagaikan semut-semut berjalan beriringan, ribuan pekerja tersebut ibaratnya masing-masing harus menenteng seember semen cair, kemudian dengan berurutan isinya mereka tuangkan ketempat-tempat yang sedang digarap. Pengerahan armada semut bermula sejak komando proyek political venues dikumandangkan.

Menanggapi komando ini, pimpinan proyek segera memobilisir ratusan tenaga muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi teknik yang ada di Indonesia. Tenaga tersebut dilengkapi

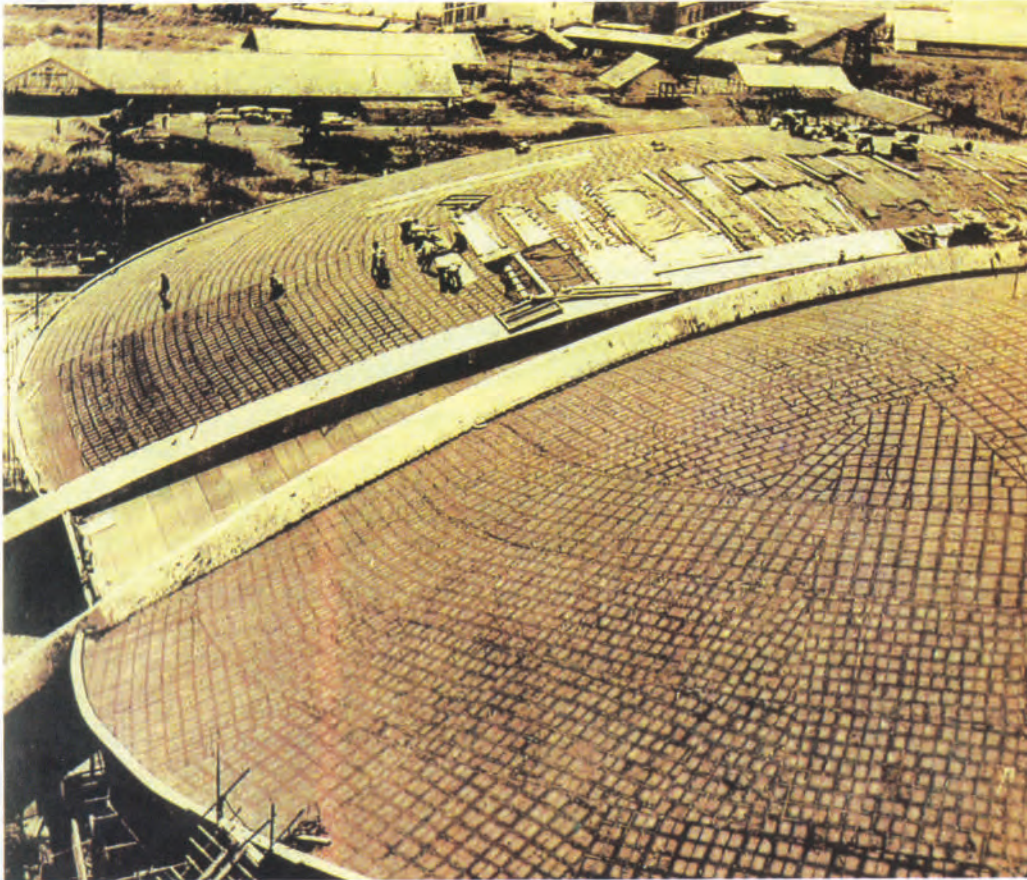


"... ibarat kepak an sayap burung garuda" Struktur atap konsep Ir. Sutami ini belum ada padanannya di dunia

puluhan tenaga senior yang direkrut dari berbagai macam departemen, instansi pemerintah, serta perusahaan-perusahaan swasta. Para pekerja dadakan ini sejak awal menyadari, tugas yang harus mereka selesaikan bukan pekerjaan gampang. Namun, mereka merasa bangga bisa diikuti sertakan dalam proyek tersebut. Mengingat pengalaman penugasan di tempat ini merupakan tantangan menarik serta uji coba jati diri peribadinya sebagai seorang insan teknik.

Dalam situasi demikian, tidak mengherankan

kalaupun kesempatan ini nantinya bisa melahirkan tekad dari mereka untuk memberikan yang terbaik dari talentanya masing-masing. Tekad untuk ikut menyumbangkan karya cipta dan karya teknik yang terbaik bagi bangsanya, sehingga dapat mewujudkan bangunan berikut kawasan yang monumental, berkepribadian Indonesia dan proses pembangunannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dampak positifnya adalah dalam menyelesaikan proyek tersebut, semua pihak terkait segera menanggapi dengan semangat kejuangan dan kebersamaan tanpa pamrih.



Detail penutup atap dari bahan tahan cuaca yang harus dipasang satu persatu. Diperlukan upaya keras dan intensif untuk merampungkan pemasangannya, termasuk proses uji coba terhadap iklim tropis.

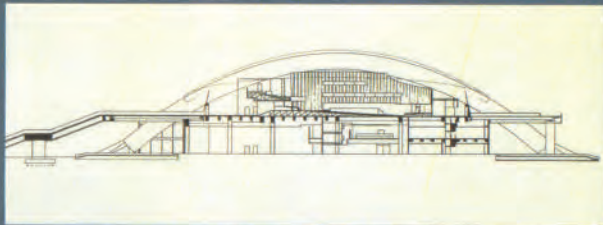
Pengalaman merupakan guru paling berharga. Andai kata kita melihat kembali suasana penggarapan pembangunan proyek *political venues*, akan terlihat bahwa pelaksanaan pekerjaan pada saat itu benar-benar merupakan guru yang sangat berharga. Guru yang sempat membentuk sumber daya insan teknik handal di Negara ini. Mereka secara serentak bisa menyelesaikan proyek yang begitu berat, sarat tantangan dan bersifat monumental, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan tekad teknisi Indonesia.

Tekad ini mendorong keinginan untuk bekerja lebih keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Di samping itu, kesatuan kerja antara tenaga teknik dan non-

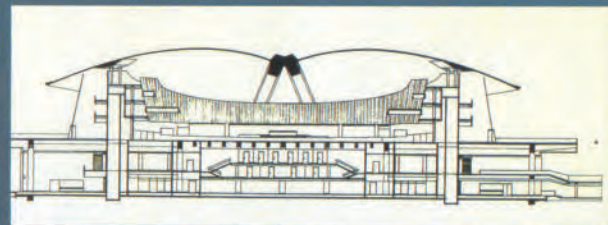
teknik, dalam suasana tempo kerja begitu cepat, menuntut semangat profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan serta jiwa pengorbanan, dilandasi dinamisnya wawasan kebangsaan.

Pengalaman menggarap proyek monumental ini merupakan pendayagunaan sumber daya manusia guna mencapai optimalisasi pencapaian lewat proses koordinasi. Seluruhnya mencakup tiga butir sasaran; pengintegrasian rencana, sinkronisasi program pelaksanaan, dan terakhir pengendalian pelaksanaan.

Melihat semangat kebersamaan berikut tekad tak mau menyerah ketika mereka menghadapi



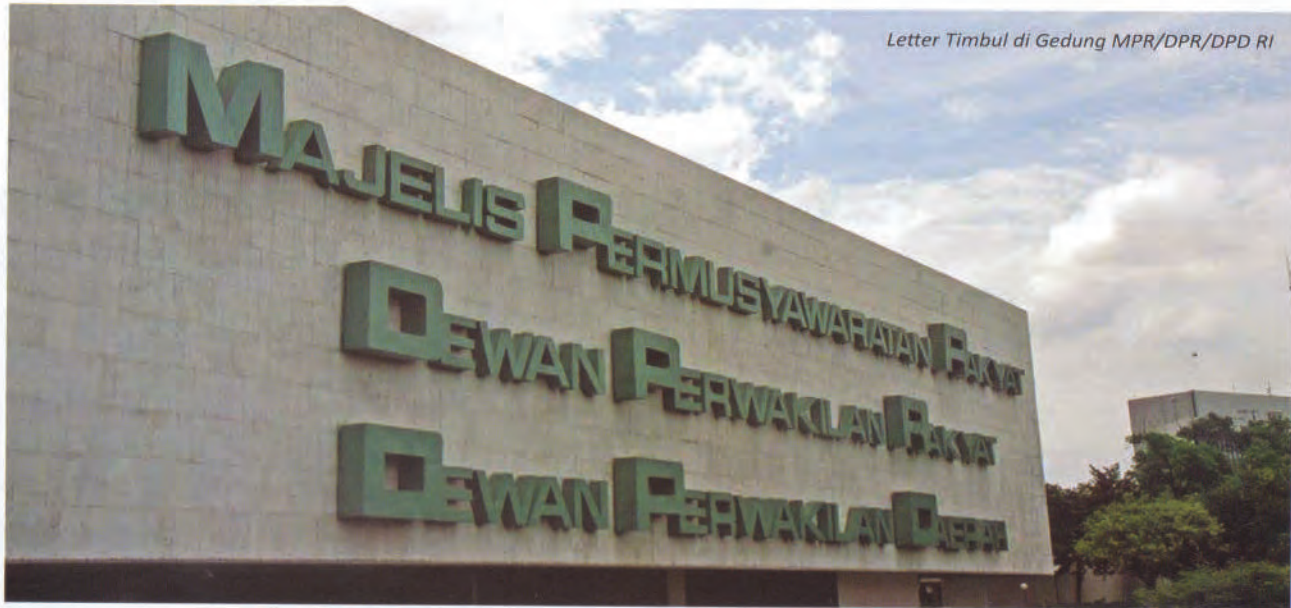
Gambar rencana potongan memanjang gedung sidang utama. Perhatikan busur beton raksasa sepanjang +/- 120 meter.



Gambar rencana potongan melintang gedung sidang utama, dua busur dengan masing – masing balok lebar 1.80 tinggi 2.80 bertemu di titik puncak plat beton atap luas +/- 7000 m2 tebal rata-rata 15 cm. Perhatikan betapa tipisnya penampang atap penutup ruangan dibandingkan dengan besarnya volume ruang yang tersedia, terlihat juga bahwa pada rancangan asli seluruh ruangan terbungkus dinding kaca. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

tantangan perkembangan teknologi konstruksi bangunan masa itu, bisa disimpulkan bahwa proyek pembangunan gedung dan kawasan tersebut merupakan titik awal pembinaan sumber daya manusia teknik secara nyata. Melalui penanaman rasa percaya diri guna mencapai kondisi kedewasaan berfikir, berikut kemampuan bertindak secara profesional.

Proyek yang digarap secara bersama-sama dari beragam disiplin ilmu ini akhirnya bisa menjadi tempat pelatihan berikut sebuah laboratorium lapangan. Dengan demikian, mereka yang sudah pernah ikut berkarya dalam proyek ini akan bisa tumbuh sebagai kader teknik. Di mana nantinya, dilingkungannya yang baru, diharapkan mereka nanti juga tampil selaku penggerak dinamika.



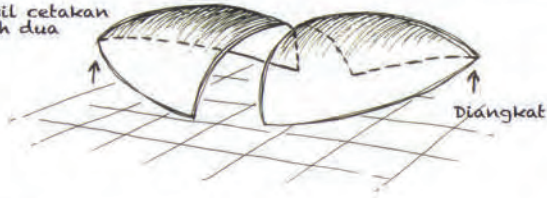
Khususnya, peranan untuk menciptakan terobosan-terobosan baru di bidang aplikasi teknik serta pelaku penerapan manajemen modern pembangunan pekerjaan umum. Suatu sistem manajemen yang sepenuhnya mendasarkan diri kepada perencanaan mantap, pelaksanaan tepat dan pengawasan ketat.

Bagaimanapun suka dukanya, perencanaan serta pelaksanaan pembangunan proyek monu mental political venues ini telah menggembelng dan membuahkkan pengalaman sangat berharga. Sehingga bisa membentuk suatu lapisan kelompok kader teknik bangunan, sebagai sumber daya manusia yang tangguh dan dapat diandalkan, agar nantinya bisa juga menangani proyek-proyek pembangunan selanjutnya. Pelajaran berharga juga bisa diperoleh ketika para pelaksana menyelesaikan struktur bangunan *Main Conference Building* (Gedung Sidang Utama) serta *Banquet Hall*. Bentuk Gedung Utama dengan bentangan 120 meter dan rumah kerang (dome) yang ditelungkupkan, bisa membentuk ruangan tanpa tiang yang menampung seribu tempat duduk di balkon bawah, dalam susunan kursi konferensi.

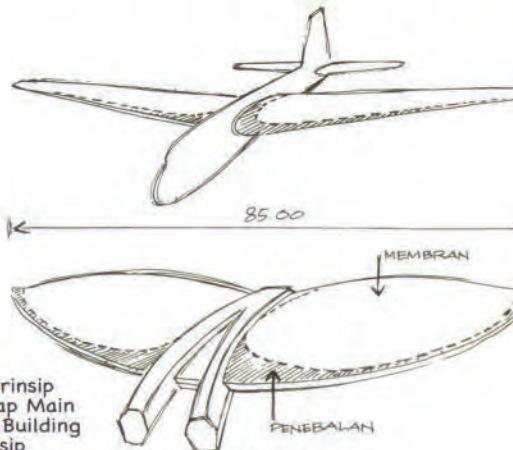
Rancangan semacam ini sangat menakjubkan, dilihat dari segi konstruksi dan perencanaan bangunan. Pada gedung utama digunakan struktur beton pratekan (prestressed concrete structures), ultimate strenght desain *cantilever* 7,5 meter, jarak kolom 25 meter dengan beton berkekuatan tinggi diatas 300 kg/cm. Konstruksi tersebut pada waktu itu dapat disebut mutakhir, merupakan teknologi struktur beton paling baru dan juga baru untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia. Kendala tersebut terbukti bisa diatasi secara baik oleh para teknisi kita. Tidak ada kata lain bisa dikatakan, kecuali telah tumbuhnya tekad kejuangan yang besar dari para teknisi Indonesia ketika mereka menggarap proyek monumental tersebut. Pekerjaan dengan teknologi canggih ini akhirnya bisa dirampungkan secara memuaskan serta tidak melebihi dari jadual waktu yang telah ditetapkan. Dengan berbekal pengalaman dalam menggarap proyek ini, para teknisi Indonesia sekarang sudah tidak akan pernah merasa ragu-ragu lagi untuk memanfaatkan teknologi baru dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan lainnya.

KEUNIKAN ARSITEKTUR

Plastik hasil cetakan
dibelah dua



Ide yang muncul pada saat-saat kritis penyelesaian maket
atap kubah



Kesamaan prinsip
struktur atap Main
Conference Building
dengan prinsip
struktur sayap pesawat
terbang. Rekonstruksi
prinsip pendekatan
struktur yang dipakai
oleh Ir. Sutami
untuk menghitung
kekokohan atap Ruang
Sidang Utama.

Selera memang tidak bisa diperdebatkan, begitu juga dengan keindahan. Apa yang indah untuk seseorang, belum juga indah untuk orang lain. Tetapi, meskipun keindahan sangat relative, ketika Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. Ing. Merancang kawasan bangunan yang sekarang ini kita namakan Gedung MPR/DPR, dia tentu saja berusaha untuk menampilkan sebuah karya terbaik. Seperti juga sudah dikemukakan, ketika terbaik. Seperti juga sudah dikemukakan, ketika Soejoedi harus merancang bangunan political venues untuk ikut dilombakan, dia terpaksa melakukannya dengan tergesa-gesa. Rancangan tersebut hanya dipersiapkan tidak lebih dari dua minggu. Bisa dipahami mengapa Soejoedi terburu-buru. Karena sebelumnya arsitek ini tidak berniat untuk ikut sayembara. Namun dengan mendadak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Soeprajogi menganjurkannya ikut.

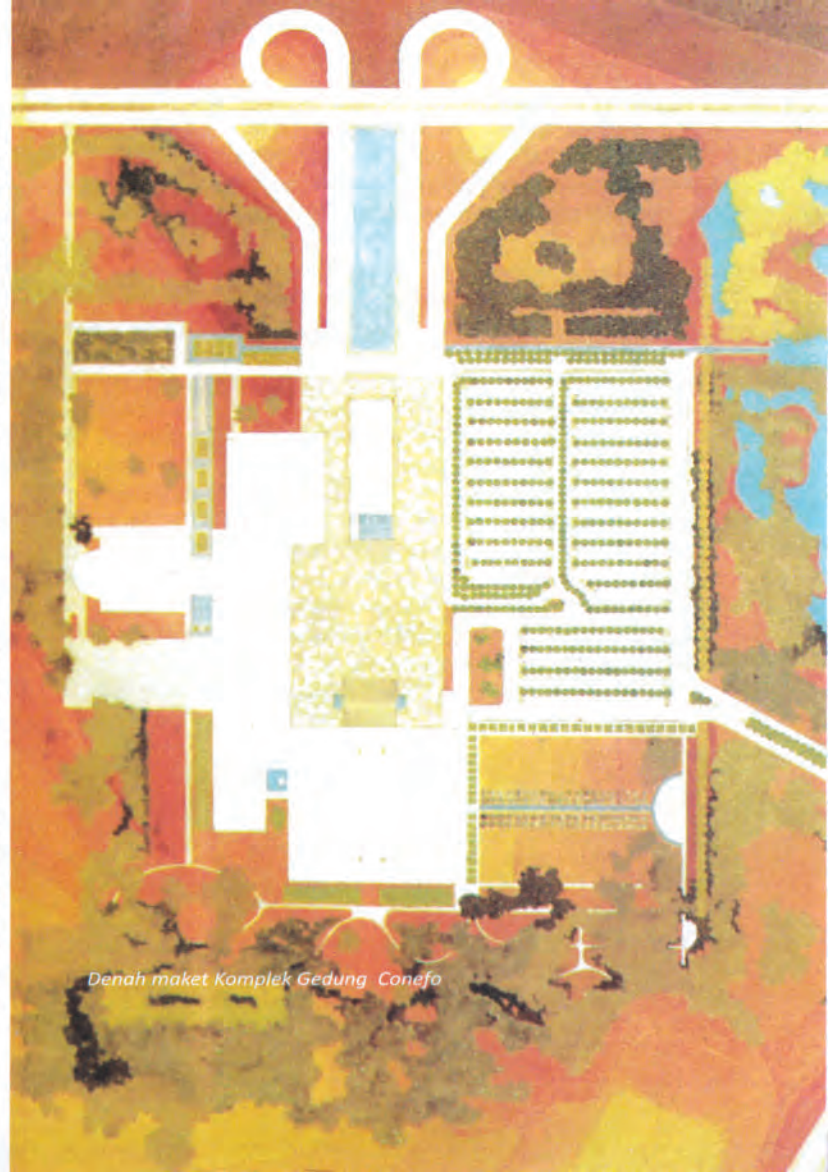
Tidak mengherankan, karena diminta dengan mendadak dan secara kebetulan mungkin sedang tidak memiliki persiapan dana, Soejoedi terpaksa menjual mobil pribadinya untuk membayar biaya awal pembuatan

gambar dan menyusun maket. Dalam situasi serba terburu-buru, ketika gambar dan maketnya hampir selesai, masih tersisa bangunan yang belum mempunyai rancangan atap. Suasana semakin menggelisahkan, karena bangunan belum beratap tersebut justru ruang pertemuan utama, induk dan kompleks kawasan yang harus dirancanginya.

Sebenarnya, ada beberapa alternatif untuk bentuk atap. Yang paling sederhana dan sudah umum dipakai adalah bentuk dan struktur kubah beton, tergantung pilihan apakah murni setengah bola atau sebagian dari bola (tembereng bola).

Sejak awal Ir. Sutami, selaku structural engineer telah memperingatkan tim arsitek, bahwa jika diputuskan untuk memakai atap kubah murni bakal muncul masalah serius menyangkut perataan penyaluran beban vertikal ke tiang-tiang penopang kubah. Satu saja diantara tiang tersebut melorot, akan bisa menimbulkan akibat berantai, seluruh kubah bakal mengalami keretakan, pecah dan akhirnya runtuh berantakan.

Sebagai konsekuensi logis jika rancangan atap memakai kubah murni, seluruh ruang sidang utama harus diberi tambahan balok melingkar besar dan tebal. Penambahan tersebut dipastikan menambah beban berat bagi bangunan kubah. Di samping itu, secara arsitektural, balok melingkar ini menjadikan hadirnya barisan tiang-tiang besar mengganggu pandangan dan membawa dampak



Denah maket Komplek Gedung Conefo

lanjutan, ikut mengganggu pembagian ruang-ruang siding di lantai dasar. Dalam berbagai diskusi, Sutami menunjukkan contoh berbagai bangunan gagal karena memakai atap dengan struktur kubah murni.

Ketentuan batas akhir untuk memasukan rancangan sayembara sudah semakin dekat. Sehingga dengan terpaksa, Ir. Nurpontjo, seorang staf Soejoedi yang ditugaskan untuk membuat maket bangunan, tetap merencanakan atap bangunan utama berbentuk kubah murni. Bahan maketnya plastic dipress di antara dua kuali penggorengan kue serabi yang diisi air panas. Sayang sekali, cara ini tidak pernah berhasil dengan baik karena selalu saja muncul keriput-keriput persis pada bagian puncak kubah. Sambil setengah putus asa, Nurpontjo mengambil gergaji, hasil cetakkannya segera dibelah dua. Ia berharap, kalau dibelah-belah seperti itu, akan ada beberapa potongan yang minimal tak kelihatan keriputnya, sehingga bisa digabung untuk menjadi kubah utuh.

Dalam suasana kritis, karena esok hari adalah batas waktu penyerahan sayembara, Soejoedi datang dan langsung bertanya memakai bahasa Jawa. "Piye dik, wis rampung? (bagaimana dik, sudah selesai?)" "Wah susah mas, tak gergaji disik (wah sulit mas, harus saya gergaji dulu)," jawab Nurpontjo. Lalu arsitek Soejoedi melihat dua potong hasil cetakan yang tergeletak di atas meja. Tanpa diduga dia

malahan berkata, "Iha iki koq apik, apa ngene wae yo atape? (Iha ini kok malahan bagus, apa begini saja ya atapnya?)" Soejoedi berkata demikian sambil tangannya memegang dan mereka-reaka bentuk yang akan terjadi jika potongan-potongan hasil pencetakan dari kuali penggorengan serabi tersebut disatukan, sebagaimana kubah murni terbelah dua yang bagian ujungnya diangkat sedikit. Kedua arsitek tersebut kemudian sama-sama berharap bisa memanfaatkan rancangan bentuk baru ini, Soejoedi segera berujar, "...tak takon Tami sik (... saya tanyakan kepada Tami lebih dahulu)."

Sutami, sebagai seseorang insinyur sipil dan ahli struktur bangunan, sangat sigap dalam menjawab dan melakukan perhitungan. Hanya dalam waktu singkat, sudah langsung membuat berbagai sketsa, dia berani memberikan jaminan, "...tidak ada halangan teknis, pokoknya bisa dikerjakan." Ia menjelaskan, struktur yang akan dibuat ini bakal menghasilkan prinsip sama dengan membuat sayap (wing) yang menempel di badan pesawat terbang, memakai prinsip struktur kantilever:

Sutami malahan berani menjamin, dengan bentangan 100 meter pun, bentuk dan struktur tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat yang akan berfungsi sebagai badan (fuselage) adalah dua buah busur beton yang dibangun berdampingan dan nantinya bertemu pada satu titik puncak.

Struktur sepasang busur beton dengan satu titik tamu tersebut kemudian harus diteruskan masuk ke dalam bumi, untuk bisa menyalurkan beban. Struktur semacam ini merupakan suatu kesatuan yang sangat kokoh dan stabil, untuk nantinya bisa dibebani dengan sayap-sayap berukuran dua kali setengah kubah beton. Penambahan tersebut juga bisa ikut membentuk atap bangunan utama seperti sayap burung Garuda. Bentuk semacam

ini meskipun sangat unik, tetapi ternyata memang tidak pernah diciptakan. Gagasannya justru muncul secara tidak sengaja. Rancangannya Soejoedi dan kawan-kawannya unggul pada komposisi massa. Dalam arti, antara bangunan yang satu dengan bangunan lain, bentuknya bisa serasi, sekalipun masih tetap terkesan menonjolkan sebuah bangunan utama.

Gedung DPR/MPR RI dari depan



Gedung DPR/MPR RI dari depan



TITIK PANDANG UTAMA

Sejak awal para perancangnya ingin memfokuskan titik sentral perhatian kepada ruang sidang utama. Konsep semacam ini langsung berlawanan dengan bangunan yang akan disaingi, yakni Gedung PBB di *New York*, Amerika Serikat. Disana, bangunan utama yang sengaja ditonjolkan adalah Gedung Sekretariat Jenderal. Bangunan sekretariat jenderal di Gedung PBB sangat besar, melebar dan menumpuk tinggi, sehingga langsung menonjol. Tetapi kalau kita cermati kawasan Gedung MPR/DPR, penonjolan justru terletak pada ruang sidang utama. Kecuali itu juga memiliki/mengandung rancangan atap sangat impresif, sehingga seketika itu juga mampu menyita pandangan pengunjung.

Penyelesaian arsitektual yang khas untuk iklim Indonesia adalah pembuatan unsur cantilever sangat lebar yang bahkan mencapai 7,5 meter pada bangunan gedung utama. Ruangan media dan lantai pertama Gedung Sekretariat mencapai 5,0 meter.

Pada lantai pertama Banquet Hall menjorok keluar 7,5 meter dari kolom. Demikian pula atap kubah dengan dengan payung pelindung sinar matahari yang cukup lebar diluar dinding kaca seputar ruang sidang utama. Di bagian dalam, pada ruangan sidang utama, secara leluasa bangunan ini sanggup menampung seribu hadirin di balkon bawah dan lima ratus hadirin di balkon atas. Rungan sidang utama tersebut semula dirancang untuk melayani delegasi dari seratus Negara, tetapi kemudian disusutkan hanya untuk 70 negara. Meskipun telah disusutkan, ruangan sidang utama tetap mempunyai ciri khusus. Di ruang ini sama sekali tidak ada deretan tiang yang mengganggu pandangan pengunjung selama mengikuti upacara, di samping itu keandalan bangunan dari bahan beton bertulang tersebut dijamin sangat kokoh. Khususnya kalau kita perhitungkan dengan tingkat teknologi pembangunan pada dasawarsa tahun 60-an yang masih belum secanggih sekarang.

Interior di dalam ruangan sidang utama juga memerlukan catatan tersendiri. Seluruh dindingnya dibuat dari kayu jati utuh. Material ini kecuali

untuk tujuan estetika juga, dengan detail khusus bisa berfungsi sebagai sarana penyerap suara. Dilengkapi suatu bentuk Garuda Pancasila tiga dimensi berukuran raksasa dari bahan perunggu seberat 1,5 ton.

Secara cermat, Soejoedi bersama kawan-kawannya merencanakan agar bangunan rancangan mereka memiliki keunggulan inovatif. Ini bisa dilihat misalnya pada bentuk kubah gedung ruang sidang utama yang bagai sayap seekor burung Garuda. Kecuali itu, juga nampak pada bangunan sekretariat. Gedung tersebut dibangun dengan agak ditekuk. Menurut keterangan, rancangan tersebut sengaja dibuat seperti itu sehingga titik pandang pengunjung bisa langsung mengarah kepada gedung utama, tanpa harus lebih dulu menebar kearah lain. Begitu pula dengan pembangunan patung kontemporer di plaza depan. Agar para pengunjung masih bisa menghayati penembusan kedalam ruang, patung ini tidak dibuat solid melainkan hollow, sehingga tidak menghalangi pandangan mata.

Kompleks Gedung MPR/DPR semula dibangun untuk bisa menampung konferensi internasional. Dengan demikian, segala macam bentuk pelayanan kepada seluruh calon pengguna bangunan telah ikut disediakan: pelayanan administrative, resepsi sampai kepada kegiatan rekreasi dan olah raga. Untuk memenuhi aktivitas olah raga, ikut di rancang sebuah jalan raya, lurus dari kawasan

political venues tersebut menuju ke sport venues di Senayan. Hal semacam ini memang tidak mengherankan, karena Bung Karno sendiri sejak dini sudah memperhitungkan, di antara kedua venues tersebut harus saling bisa melengkapi.

Elemen *landscape* tidak pernah dilalaikan agar bangunan ini mampu memberikan sentuhan suasana yang monumental dan membanggakan. Menurut catatan semula, lahan untuk kawasan MPR/DPR seluruhnya mencapai 72,8 ha. Dalam perjalanannya, dari lahan seluas itu, peruntukannya sekarang ini telah terbagi dalam empat sub blok: yaitu kompleks MPR/DPR 41,2 ha, kompleks manggala wanabhakti 12,9 ha, Taman Ria 11,2 ha dan kompleks TVRI berikut Graha Pemuda 7,5 ha.

Tidak seluruh lahan seluas itu dijejali dengan bangunan. Sebagai bahan perbandingan, dari 41,2 ha luas kompleks MPR/DPR, luas bangunan sidang utama dua lantai, Graha Tama, hanya 23.870 m² dengan luas lantai dasar 11.642 m². Kemudian bangunan sepuluh lantai dan satu basemen lokawirsabha hanya berluas lantai 4.500 m². Bangunan Grahakarana, terdiri dari satu lantai, satu basemen dan satu balkon, lantai dasarnya seluas 11.642 m², kemudian Pustakaloka terdiri dari dua lantai dengan lantai dasar, seluas 4,480 m². Ditambah lagi dengan sebuah bangunan baru, mulai dibangun tahun 1993, terdiri dari 24 lantai di atas tanah, lantai dasarnya tak lebih dari 6.252 m². Dari catatan tersebut terlihat, masih terbuka

ruang cukup luas yang bisa ditata untuk menunjang keindahan kawasan. Ini sangat berlainan dengan berbagai macam bangunan masa kini yang selalu terkesan sesak, karena dibangun terlampau dekat dengan jalan raya, sebagai dampak kesulitan lahan. Suasana sesak semacam itu tidak akan ditemukan di kompleks Gedung MPR/DPR.

Masyarakat justru akan bisa secara tuntas menikmati keindahan hasil rancangan arsitek Soejoedi jika melihatnya dari arah jauh. Kemudian secara perlahan melewati halaman sangat luas di sebelah depan, di sebelah kiri danau buatan dan di sebelah kanan air mancur. Sebelum nantinya, sesudah melewati sebuah patung yang mengesankan, menghampiri bangunan induk dengan sebuah tangga terbuka luas, yang terkesan akrab untuk menyambut datangnya semua pengunjung.

Penataan ruang luar bangunan di kawasan tersebut sudah ikut dipikirkan sejak awal pembangunan. Ir. Slamet Wirasondjaja MLA bersama sejumlah mahasiswa ITB Bandung, ditunjuk untuk merancang interior serta landscaping-nya. Penunjukan tersebut hanya berlangsung kurang satu bulann dari upacara pemancangan tiang pertama pada pertengahan bulan April tahun 1965.

Meskipun harus dikerahkan secara mendadak, rancangan taman yang dihasilkan oleh tim pimpinan Ir. Slamet Wirasondjaja MLA tetap mengacu

sepenuhnya kepada gagasan awal dan Soejoedi berikut saran-saran Bung Karno. Sehingga tidak mengherankan, sebagaimana jika dinikmati oleh masyarakat sekarang ini, keberadaan taman tersebut mampu menyatu dengan keseluruhan bangunan dan kawasan setempat.

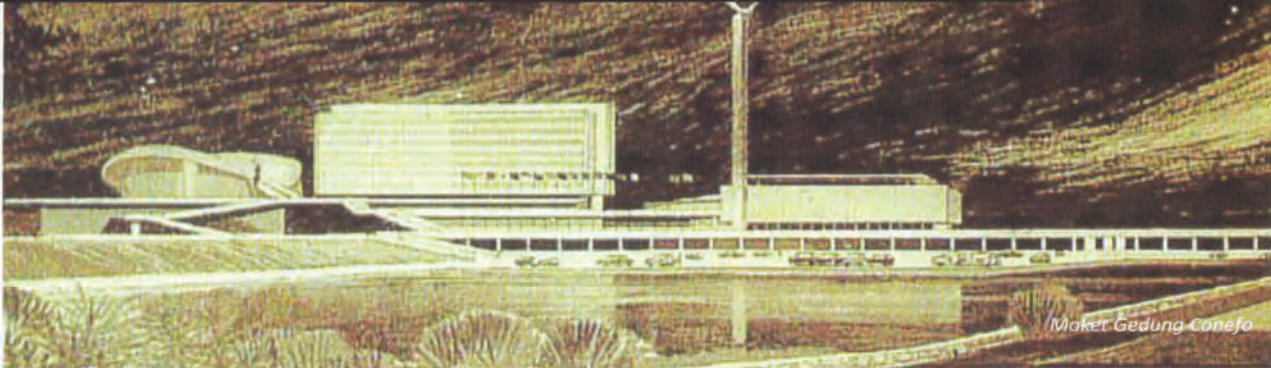
Konsep tata letak yang digariskan bersama oleh Soejoedi, selaku pimpinan arsitek, dan site planner-nya Slamet Wirasondjaj, adalah monumentalisme yang diwarnai oleh gaya modern yang pada masa itu sedang menjadi kegemaran. Dengan demikian setiap bangunan harus mampu mencerminkan fungsinya masing-masing dalam susunan massa (menjadi gubahan massa) bukan gubahan ruang.

Susunan gubahan massa semacam ini, dengan penempatannya jauh menjorok dari jalan, dengan sendirinya sudah mampu menghadirkan kesan monumental. Menyadari kenyataan bahwa gedung-gedung di kompleks tersebut tidak menam-

pakkan ciri vertikalisme, karena semuanya berupa permainan bidang dan garis-garis *horizontal* yang tentu saja bisa menyurutkan kesan monumental. Dipastikan peranan *landscape* harus menonjol. Agar mampu mengangkat derajat bangunan proyek termaksud, kemudian dirancanglah secara nyata sumbu-sumbu monumental. Hal ini bisa terlihat dengan pembangunan jajaran air mancur di sepanjang sumbunya di bagian depan dan di bagian belakang gedung dirancang untuk menumbuhkan sumbu tersebut, unsur-unsur lebih hijau.

Dengan ini, kesan monumental proyek akan tercapai lewat rancangan *hard landscape* pada bagian dan depan *soft landscape* di bagian belakang. Sisa-sisa halaman yang masih cukup luas, dengan tetap mengacu kepada sumbu-sumbu tersebut, diciptakan lawan dan barrier-barrier, terutama untuk menutupi pemandangan buruk dari sekitar yang bisa merusak.

Landscaping Proyek Conefo



Pada tanggal 22 Februari 1965 Presiden Soekarno telah memilih rancangan *Political Venues* karya Soejoedi Dipl. Ing. Dari antara empat rancangan yang diajukan. Demikian menurut Keterangan Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga, dimuat oleh surat kabar "Merdeka" tanggal 23 Februari 1965. pa Sebagaimana yang dapat terlihat pada rancangan awal Soejoedi, gugusan bangunan-bangunan pada rancangan proyek ini sudah memiliki suatu pola penataan ruang luar secara menyeluruh dan secara garis besar. Penjabarannya masih memerlukan penanganan lebih lanjut oleh tenaga ahli *landscape architecture* (arsitektur landscape).

Berikut ini kutipan dari keterangan tertulis Ir. Slamet Wirasondjaja, MLA :

Lampiran 1

1. Lampiran 1 merupakan satu-satunya informasi berupa foto maket sebagai hasil sayembara karya Dipl. Ing. Soejoedi yang telah dipilih oleh Presiden Soekarno, yang diterima satu minggu setelah penunjukan untuk saya pelajari seandainya nanti dilibatkan dalam proyek landscaping proyek tersebut. Informasi lain seperti peta, letak proyek, nama jalan, gambar yang biasa dikenal dengan site plan, tidak ada. Gambar dasar bangunan pun hanya titik-titik tiang dan ukuran utama yang menyertai maket yang tidak pernah diperlihatkan. Penjelasan dari arsitek Soejoedi pun tidak terperinci dan tidak mengarahkan, malahan kita harus menggali, mengembangkan dan memberikan

interpretasi sendiri. Kita diberi kebebasan seluas-luasnya agar proyek tersebut terdpta secepat-cepatnya.

Lampiran 2

2. Kemudian datang surat tugas (lampiran 2) tanggal 11 Mei 1965 yang ditandatangani oleh Soenaijo Sosro selaku ketua 1 Tim Perencanaan dan Pengawasan Teknik, yang ditujukan kepada saya sendiri untuk menghadap Presiden Soekarno mengenai *Landscape* Proyek Conefo antara tanggal 17 dan 22 Mei 1965. Dari surat tersebut saya hanya diberi waktu kurang lebih enam hari untuk membuat presentasi yang terbaik, tanpa didukung oleh data seperti pada poin 1.

Entah bagaimana, saya sudah lupa caranya, akhirnya kami dapat membuat satu konsep, tanpa konsultasi lagi dengan Pak Soejoedi karena saya mengerjakannya di Bandung, sedangkan beliau ada di Jakarta.

Gambar yang kami hasilkan sebesar ukuran *Hard-board* (+ 120 cm x 220 cm), dan saya beri warna dengan plakat oil (cat plakat). Dasar gambar berwarna jingga, aspal dan tempat parkir berwarna abu-abu, rumput berwarna hijau muda, pohon hijau tua, plaza dan pengerasan pada kebun-kebun berwarna merah bata, air berwarna biru, bangunan berwarna putih.

Saya kira gambar berwarna tersebut adalah yang pertama kali diperkenalkan di bagian Arsitektur, yang mengejutkan semua pihak. Yang membantu saya (yang masih teringat) adalah Sdr. Roby Soelarto, Sdr. Hendro T. Soemardjan, Wahyudi, Zaini, dan Slamet, yang pada saat itu masih mahasiswa, bekerja sukarela siang malam. Peralatannya pun,

terutama cat, adalah sisa-sisa ketika saya masih belajar di Harvard (saya kembali dari Harvard sekitar November 1964, baru enam bulan kembali dari luar negeri). Perlu diketahui, pada saat itu serba sulit untuk mendapatkan bahan-bahan peralatan gambar.

Tepat semalam sebelum 17 Mei 1965, gambar telah berhasil diangkut ke Jakarta dengan susah payah, karena kendaraan sulit didapat. Pada saat itu Pak Soejoedi tidak sempat melihat gambar tersebut karena sedang di luar negeri. Tanggal 18 Mei 1965 pukul 05.00 dini hari, rombongan yang terdiri dari Soeprayogi, Soenaryo, Pak Toto dan saya sendiri, diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka.

Beliau baru saja selesai menunaikan sholat subuh. Mengenakan kaos oblong, tanpa kupiah hitam khususnya, sehingga saya ragu yang mana yang dinamakan Presiden Soekarno. Sesudah terdengar suaranya, baru saya yakin bahwa yang berada di hadapan saya adalah Presiden Soekarno. Beliau sangat terkesan dengan rencana tersebut bahkan mengatakan tidak mengira bahwa Indonesia mempunyai seorang *Landscape Architec*. Kemudian beliau terkesan sekali dengan warna merah bata yang merupakan komposisi utama dala kebun. Beliau memberi contoh tentang masalah siluet, warna, cahaya, bayangan, yaitu pada pohon papaya dengan latar belakang dinding tembok putih. Begitu gembiranya beliau melihat hasil rancangan, sehingga beliau memberi wejangan-wejangan mengenai masa depan pembangunan antara lain tumbuhnya pencakar langit di Indonesia dan tumbuhnya taman-taman besar. Beliau meminta saya untuk berkeliling Taman Istana yang pada awalnya diantar sendiri oleh beliau, kemudian beliau menyuruh ajudannya untuk mengantar lebih jauh.

KOMANDO
PEMBANGUNAN PROJEK CONEFO
(KOPRONEF)

Alamat: Gedung Utama Gedung Sang Karno, Plaza 00108, Senayan, Jakarta 10117 T. 021-271515

Surat Tugas
No. 10/10/1965/1000/1000

1. K E R J A : / Tim Khusus untuk Taman Istana
2. Misi : Meneliti & menentukan jenis, jumlah,
3. Tempat : Kebun Istana dan di lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Surat Tugas No. 10/10/1965/1000/1000

Surat Tugas
No. 10/10/1965/1000/1000

Ditandatangani
A. K. S. P. -
1. *[Signature]*

Surat Tugas
Pembangunan
Proyek Gedung
Conefo

Di Taman Istana, beliau berkelakar ke tukang kebunnya, dengan menyuruhnya memungut sampah ditempat-tempat tertentu yang memang beliau sendiri yang menyimpannya, agar tukang kebun tersebut selalu waspada dengan kebersihan, dan beliau sangat teliti bahkan di bawah perdu-perdu pun mendapat perhatian. Demikianlah cara beliau menanamkan kesadaran akan kebersihan kepada tukang kebunnya.

Sekembalinya ke bangunan Istana, saya sangat terkejut karena Presiden yang saya kenal tadi berubah penampilannya dengan pakaian kebesarannya yang sering terlihat di foto-foto surat kabar, karena beliau akan menerima Duta Besar. Saya mendapat kehormatan untuk ikut menyaksikan upacara penerimaan Duta Besar.

Hasil pertemuan dengan Presiden tersebut dimuat di Koran (kami lupa Koran apa) yang dibertanya dikutip dari Antara (Lampiran 3).

Lampiran 3

3. Dengan disetujuinya rancangan tersebut, maka Proyek Conefo mempunyai apa yang kemudian kita sebut Site Plan, seperti telampir (lampiran 4). Saya sendiri pindah ke Jakarta, ditampung di wisma Hasta, Senayan, tanpa meninggalkan tugas mengajar di ITB dan kadang-kadang mahasiswa sendiri yang datang ke Jakarta.

Di Jakarta, saya membentuk Tim Khusus, saya sendiri sebagai Ketua Tim Landscaping, karena tugasnya bukan hanya merencana tapi juga melaksanakan, seperti pengadaan peta, penyelidikan tanah, pengadaan tanaman yang didapatkan dari Bogor kalau tidak salah melalui Departemen Kehutanan. Penasehat tanaman untuk tim tersebut adalah Rio Rahwartono.

Saya sendiri diberi 2 truk bak terbuka dan mungkin itu operasi pemindahan pohon secara besar-besaran yang pertama kalinya di Indonesia. Saya berhasil memindahkan pohon-pohon dengan tinggi minimal 3 meter, dan diangkut pada malam hari dengan kecepatan maksimum 40 km/jam. Kemudian pohon-pohon tersebut diletakkan di lokasi sekitar proyek, yang sekarang dijadikan lapangan Tembak. Saya sendiri membuat percobaan taman sikas yang juga merupakan saran Presiden Soekarno. Sikas tertinggi yang berhasil kami peroleh adalah setinggi 2 meter.

Dengan materi yang ada, kemudian dibuat gambar-gambar detil, yaitu *Flower Garden* yang mengisi halaman samping bangunan kubah,

Taman *Biomorphic* dan *Friendship Mall*, untuk mengisi halaman belakang bangunan Kubah. Sedangkan di halaman *banquet* dan *Auditorium*, di bangun taman dengan nama *Yellow Hill* dan *Blue Garden*. Pekarangan yang menghadap ke jalan Senayan dan Gatot Subroto, dibuat taman air yang dinamakan *the Lake*- suatu danau buatan dengan dua pulau di dalamnya.

Site Plan tersebut membantu mereka yang akan merencanakan instalasi-instalasi mekanikal dan bangunan-bangunan *service* lainnya, beserta *security system*.

Bagian muka bangunan kubah yang dinamakan Plaza- tempat tiang-tiang bendera peserta dan *the Pool*- yang dihiasi air mancur sebagai pengganti *Shopping Arcade* menurut rencana awal, dan bagian depan dibuat *The Lawn*.

Pola utama *Site Plan* adalah grid pattern, sedangkan *variable* bentuk lainnya menggunakan *pola curvi linear*, seperti yang diterapkan di *the Lake*. Di luar bangunan, sebelum G30S/PKI, yang sebagian besar sudah kelihatan selesai hanyalah daerah *the Lake*.



Menurut rencana awal, di *the Lake* ini aka ada patung kuda yang keluar dari air dengan menyemburkan air seperti kesan yang didapatkan di taman *Versailles*. Rencana patung kuda tersebut, senimannya adalah Sidharta.

Kesulitan yang di dapat dalam pelaksanaannya adalah pengadaan bahan-bahan paving. Semula akan mendatangkan *klinker* dari Eropa, sedangkan bahan lainnya seperti batu dan batu pahat dari dalam negeri. Lampu-lampu taman akan didatangkan dari Jerman, demikian juga dengan air mancurnya. Khususnya untuk *the Lake* (yang masih saya ingat) dasarnya dilapisi ijuk, pasir dan batu, dengan tujuan untuk menjaga kejernihan air di samping dengan aerisasi dengan *fountain* melalui patung kuda tersebut. Demikianlah catatan-catatan yang masih teringat, yang kebesarannya mendekati 90%.

Bandung, 18 September 1994

Lampiran 4

Keerangan Gambar

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| A. Conference | J. Rear parking area |
| B. Biomorphic Garden | K. Blue garden |
| C. Friendship Mall | L. Banquettes |
| D. Hellipad | M. Lawn |
| E. Past Jade | N. Pool |
| F. Secretariat Building | O. Main parking area |
| G. Auditorium | P. The Lake |
| H. Yellow Hill | Q. Flower garde |
| I. Filling Station | |

PRESIDEN SETUDJUI RgN- TANA PERTANAMAN PRO- JEK KONEFO

Djakarta, 19-5 (Antara). Presiden Sukarno menjatakan persetujuannya terhadap rencana pertamanan Proyek Konefo yang diadjujkan oleh Komandan Kopronet Majjejen Suprajogi beserta para stafnya di Istana Merdeka Rabu pagi.

Selesai diterima kepala negara, Ir Sunarjo yang mewaleji Ir Sujudi selaku Deputy Danr-Kopronet, menerangkan kepada pers, bahwa Majjejen Suprajogi yang diadjujgi oleh Ir Sunarjo dan Ir Slamet, arsitektur pertamanan dengan pembantuannya Ir. Toto, Kepala Staf Pelaksanaan Kopronet, pagi itu menghadap Presiden untuk menjampaikan rencana pertamanan untuk Proyek Konefo.

Menurut Ir Sunarjo, Presiden telah menjetujui rencana pertamanan itu pada umumnya, dan rencana bobo-rapa tanaman yang tidak ditro-headakotja. Dalam hal ini Kepala negara disamping menuntikan arsitektur dari gedungnya, juga arsitektur pertamanannya sampai pada rencana pertamanan di dalam gedung, yang belum lagi ter-tjanakan oleh Kopronet.



MENJADI GEDUNG DPR

Sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, tanggal 17 Agustus 1966 merupakan batas akhir penyelesaian pembangunan proyek *political venues*. Tetapi melalui kerja keras dari ribuan orang seperti yang pernah dikemukakan, menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-20, seluruh struktur berbagai bangunan telah bisa terwujud. Tinggal tersisa beberapa bagian yang masih memerlukan sentuhan akhir. Namun sentuhan akhir tersebut kemudian lantas menjadi terganggu, menyusul meletusnya peristiwa G30S/PKI dan hari-hari kurang menentu sesudahnya.

Seperti diketahui, meletusnya peristiwa tersebut langsung menyulut pergolakan besar terhadap segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kondisi seperti itu, terjadinya pergolakan besar di tengah kehidupan masyarakat menyebabkan, berbagai hal yang semula sudah direncanakan mulai menjadi kacau balau. Proses peremajaan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di dekat Lapangan Banteng juga terganggu dan malahan akhirnya, terpaksa dihentikan sama sekali.

Pada sisi lain, pembangunan kawasan calon tempat penyelenggaraan *Conference of the New Emerging Forces* juga mengalami situasi serupa. Tetapi, meskipun hams menghadapi kenyataan ini, oemerintah ternyata tetap berpendapat



Jendral Soeharto, Ketua Presidium Kabinet Ampera Meninjau Situasi Proyek Conefo didampingi arsitek Soejoedi.

perlu memiliki sebuah bangunan permanen, yang bisa digunakan secara layak, sebagai tempat persidangan para wakil rakyat. Mengingat keberadaan bangunan semacam itu, merupakan pertanda utama bahwa Negara dan Pemerintah Indonesia menganut prinsip demokrasi.



Pada waktu situasi negara dan masyarakat sedang kocar-kacir sebagai akibat lanjutan dari meletusnya peristiwa G30S/PKI, menjelang akhir tahun 1966 berlangsung pembicaraan antara pihak pemerintah dengan pimpinan DPR. Pembicaraan dilakukan untuk bisa merumuskan jawaban, apakah DPR nantinya masih tetap akan terus menggunakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang dipersiapkan? Ataukah, mencari sebuah gedung baru? Pada kenyataannya, satu-satunya bangunan yang saat itu cukup memadai serta memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat persidangan para anggota DPR, tidak ada lain kecuali kawasan yang sedang dipersiapkan oleh Kopronef, di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta.

Jenderal Soeharto, Ketua Presidium Kabinet Ampera, kemudian meluangkan waktu mengunjungi bangunan utama Kopronef. Bangunan tersebut strukturnya telah siap, bentuknya telah nampak,

walaupun terdapat beberapa bagian masih memerlukan sentuhan akhir. Sesudah melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan memperoleh segala masukan, akhirnya turunlah surat nomor 79/U/Kep/II/1966, tertanggal 9 November 1966.

Presidium Kabinet Ampera memutuskan :

PERTAMA, pembangunan proyek *political venues* akan tetap terus dilanjutkan, tetapi sekarang dengan pengertian, peruntukannya diubah dari calon tempat penyelenggaraan Conefo diganti untuk menjadi Gedung MPR/DPR.

KEDUA, pengelolaan dan penyelenggaraan lebih lanjut dari proyek pembangunan ini diserahkan sepenuhnya serta dipertanggungjawabkan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Kesemuanya disatukan dengan istilah Proyek Departemen Pekerjaan Umum.

Surat keputusan Presidium Kabinet Ampera ini membuktikan. dalam suasana masyarakat sedang mengalami pergolakan pasca G30S/PKI, Pak Harto terbukti memiliki visi jauh ke depan. Sebagai seorang demokrat yang senantiasa berpegang kepada konstitusi dan selalu menghargai sepenuhnya kedaulatan rakyat, beliau juga menghargai pentingnya bangsa yang besar ini memiliki sebuah kawasan berisikan bangunan monumental, permanen, representatif dan megah. Sebuah bangunan yang bisa dibanggakan untuk menampung aktifitas demokrasi masyarakatnya.

“Demokrasi yang kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila, yang norma-norma pokoknya, hukum hukum dasarnya telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti, penggunaan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, harus menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, harus menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong-royong” demikian pendapat Pak Harto tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana dikemukakannya dalam buku *Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*.

Sebuah gedung, sekalipun hanya dipakai sebagai tempat persidangan para anggota MPR dan DPR, bukan sekedar bangunan biasa. Gedung tersebut merupakan wahana penjabaran salah satu butir Pancasila, yakni keinginan untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Dari gedung tersebut, bermuara segala macam keputusan yang akan bisa memberikan peneguhan terhadap jalannya pemerintahan. Inilah gedung yang bakal menjadi bangunan Lembaga Tertinggi dan tinggi Negara, pencerminan suatu negara yang selalu ingin untuk bisa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, rnenempatkan mandat rakyat di atas segala-galanya.

Hal ini segera nampak, ketika pemerintah dengan cepat segera turun tangan untuk mengambil alih persoalan . Presidium Kabinet memutuskan proyek pembangunan kawasan tersebut tetap diselesaikan, dengan perubahan peruntukan menjadi gedung MPR/DPR, atau keperluan persidangan kenegaraan lainnya. Sedangkan kepengurusan dan pelaksanaan pembangunannya diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan dimasukan sebagai proyek Departemen Pekerjaan Umum.

Menteri Pekerjaan Umum tanggap dalam menerima tugas penting ini. Melalui Surat Keputusan Nomor 16/PRT/1966 tanggal 19 Desember 1966, menteri membentuk badan pelaksana dengan nama Proyek

Pembangunan Gedung MPR/DPR sesudah terlebih dulu membubarkan organisasi Kopronef. Proyek baru tersebut segera turun tangan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan *finishing*, melaksanakan pembuatan elemen-elemen estetika (mural, relief, dan patung patung), menyelesaikan pekerjaan *landscape* dan pertamanan. Di samping itu juga menangani pekerjaan *mechanical* dan *electrical*.

Sebagaimana proses penyelesaian pemba-ngunan terdahulu, kali ini pelaksanaanya juga tidak boleh tertunda-tunda. Badan pelaksana baru, Proyek Pembangunan Gedung MPR/DPR, sudah memiliki sasaran khusus, yakni mempersiapkan kondisi gedung siap pakai serta penyediaan segala fasilitas untuk penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 1968. Selama perjalanan waktu, organisasi pelaksana pembangunannya ternyata terus berkembang dengan dinamis.

Berdasar Keputusan Menteri PU Nomor 6/PRT/1967 tanggal 30 September 1967, diadakan perubahan struktur organisasi Proyek Gedung MPR/DPR dengan menempatkannya di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian, melalui Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 49/ KPTS/CK/ VI/1968, nama Proyek Pembangunan Gedung MPR/ DPR untuk seterusnya diganti menjadi Proyek Pembangunan dan Pengendalian Kompleks MPR/ DPR.

Penyempurnaan organisasi pelaksana pembangunan yang dilakukan secara beruntun tersebut membuahkan hikmah. Pengaruh suasana dari luar yang secara tidak langsung pernah mengganggu pelaksanaan pekerjaan bisa mulai dikendalikan. Sehingga tidak mengherankan, kalau dalam waktu relatif singkat, penyelesaian pembangunan kawasan tersebut bisa dilanjutkan dan akhirnya dirampungkan.

Tahap pertama pembangunan bisa diserahterimakan dari Dirjen Cipta Karya kepada Sekjen DPR GR pada tanggal 15 Maret 1968. Oalam tahap tersebut, telah -dirampungkan penyelesaian Gedung Main Conference Building, untuk sebagian jalan utama dan jalan service. Disusul penyerahaan tahap kedua, Secretariat Building dan bangunan Balai Kesehatan, dilaksanakan melalui serah terima pada tanggal 20 Maret 1978. Berbagai macam hambatan yang pernah menghadang, tidak pernah mampu menyurutkan tekad para pelaksana proyek dalam merampungkan bangunan monumental ini. Sampai akhir tahun 1978, dari seluruh gugusan bangunan Gedung MPR/ DPR, yang masih belum bisa diselesaikan hanya tinggal Banquet Hall dan Auditorium. Ini semua akhirnya, pada bulan September 1982 pembangunan Auditorium dirampungkan dan Gedung Banquet diselesa ikan pada bulan Februari 1983.

Pemberian nama bangunan di gedung MPR/ DPR juga ikut mengalami perkembangan dengan

dikenalkannya pemakaian istilah berasal dari bahasa Sanskerta. Bangunan Main Conference Building yang berfungsi sebagai Gedung Sidang Utama sekarang diberi nama Grahagama. Kemudian bangunan yang semula dirancang untuk Press Center beralih fungsi menjadi ruang komisi dan diberi nama Gana Graha, sedangkan bekas Sekretariat Building dialih fungsikan menjadi kantor kerja Anggota Dewan, mendapatkan nama baru, Lokawirasabha. Perubahan nama juga meluas ke Banquet Hall, yang sekarang telah dialihfungsikan menjadi ruang perpustakaan serta tempat upacara pelantikan, nama barunya, Pustakaloka. Sementara auditorium beralih menjadi tempat sidang Pleno, diberi nama Graha Karana. Sedangkan Pascad, bangunan yang semula untuk pasukan cadangan sekarang ini direnovasi menjadi poli-klinik dan diberi nama Balai Kesehatan.

Sementara itu, meskipun semua bangunan sudah dinyatakan telah selesai, tetapi pelaksanaan pekerjaan memang tidak akan pernah ada batas akhirnya. Secara terus-menerus pekerjaan perawatan serta pemugaran bangunan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR/DPR. Begitu pula pemugaran dan pembangunan gedung baru untuk menunjang keberadaan kawasan tersebut, terus dilaksanakan sesuai dengan irama kebutuhan. Dalam kaitan ini, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dicatat antara lain, pembangunan sebuah gedung baru yang akan digunakan oleh Sekretariat

Jenderal MPR DPR dengan diberi nama Samania Sasanagraha. Kemudian pekerjaan waterproofing dan penggantian lapisan akustik di bawah plat atap kubah beton serta pembangunan sementara lima ruang sidang komisi di Gedung Gana Graha.

Gerak pembangunan memang tidak hanya akan berhenti disini. Mengingat usia bangunan tersebut semakin tinggi, meluasnya berbagai macam kebutuhan pelayanan yang perlu ditampung serta adanya kemajuan sistem teknologi dari berbagai macam bahan bangunan. Maka proses pembangunan lanjutan berikut renovasi di Kompleks Gedung MPR/ DPR praktis tidak pernah berhenti.

Sesudah berbagai macam pekerjaan di atas berhasil diselesaikan, kemudian mulai dikerjakan perbaikan pada sistem AC sentral, dilanjutkan perubahan sistem kelistrikan, perbaikan menyeluruh pada struktur beton di auditorium, perbaikan besar pada ruang bawah tanah Lokawirasabha dilengkapi dengan penggantian lift serta elevator di gedung Grahagama. Kerja keras dari beribu-ribu orang selama bertahun-tahun, akhirnya bisa mewujudkan hadirnya sebuah bangunan monumental di tengah ibu kota Indonesia, Jakarta. Kompleks kawasan Gedung MPR/DPR dengan lingkungan sekeliling tertata secara rapi, yang keberadaannya pasti akan bisa dibanggakan oleh setiap warga masyarakat Indonesia.

Suatu kawasan yang tampil sebagai tempat persidangan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Bermuaranya segala mandat yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Dimana setiap awal tahun, kepala negara menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara kepada para wakil rakyat Indonesia. Dan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR RI dan dihadiri pula oleh para warga teladan terpilih dari seluruh Indonesia. Dan setiap lima tahun sekali, tampil sebagai tempat berlangsungnya proses pencalonan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekaligus tempat presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan di muka sidang anggota lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan demikian, presiden terpilih menjadi seorang Mandataris, untuk mengemban sepenuhnya amanat seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, pada hari-hari lain di luar jadwal tersebut di atas, gedung ini menjadi tempat penyelenggaraan persidangan para anggota DPR. Gedung ini selalu tampil pula sebagai tempat penyerahan hasil-hasil temuan badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tinggi negara yang bertugas khusus. untuk mencermati pengelolaan keuangan negara.

Inilah kawasan yang akhirnya bisa tampil menjadi kompleks bangunan sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Tempat para wakil rakyat bertemu untuk menyalurkan suara hati seluruh warga masyarakat Indonesia. Tempat para wakil rakyat bersidang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya untuk masa kini, tetapi harus terus dilestarikan untuk masa-masa mendatang. Dari kawasan inilah, letak sumber keabsahan pemerintahan dan pembeban mandat kepada kepemimpinan negara dalam mengemban tugas, mengamalkan sepenuhnya prinsip kedaulatan rakyat.

Inilah gedung yang sepenuhnya harus dan akan tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Dimana mereka bisa datang, mengadukan nasibnya atau mengikuti para wakil rakyat hasil pilihannya, menjalankan tugas yang telah diamanatkan.



Ruang Sidang Utama dilihat dari belakang. Pandangan ini jarang terlihat umum dan jarang dipublikasikan, padahal tak kalah megahnya dari pandangan depan.



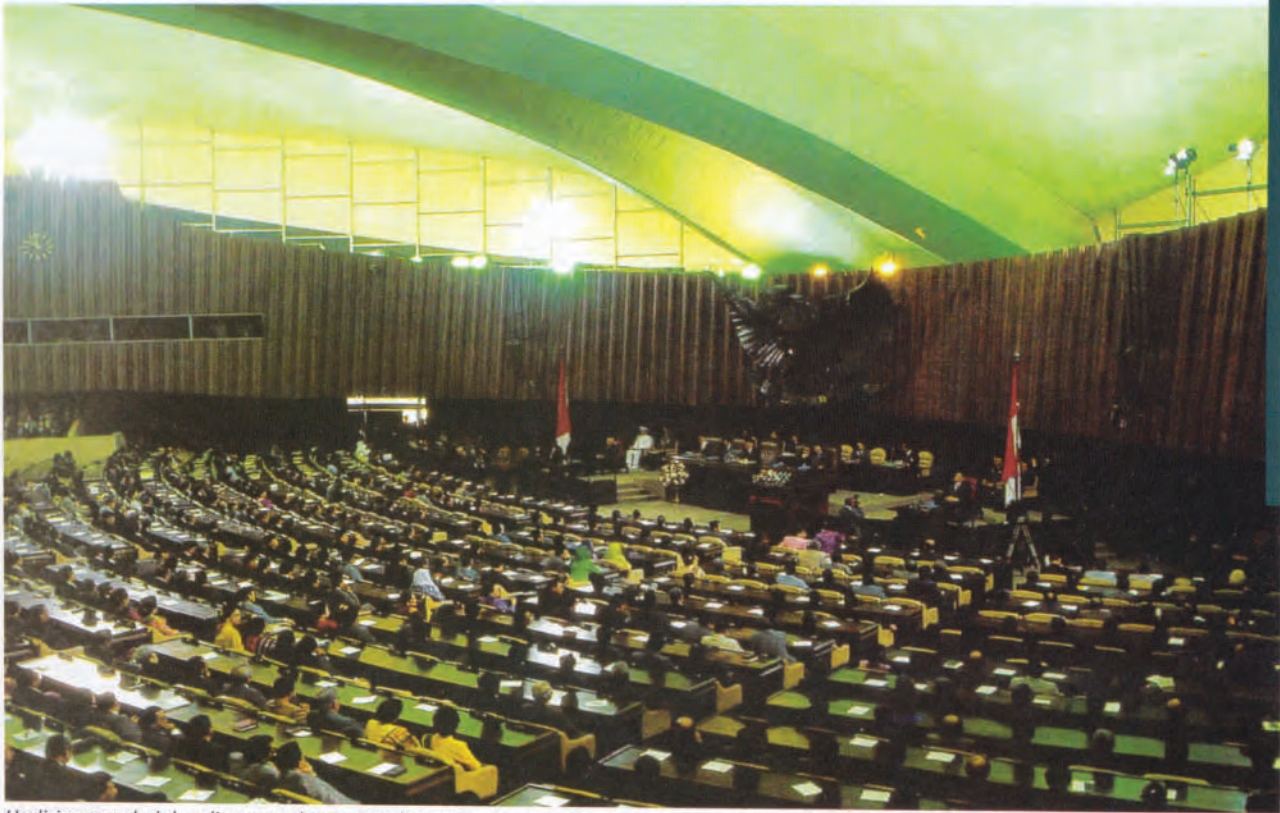
Karya But Mochtar dikolam di depan ruang sidang umum. Karya ini dirancang sebagai pengikat bangunan – bangunan di dalam komplek MPR/DPR secara visual. Pemilihan ekspresi rongga dimaksudkan untuk tidak mengurangi keberadaan masing – masing bangunan.



Patung Estetika di Komplek Gedung DPR/MPR RI



Komplek Gedung DPR/MPR RI



Hadirin yang duduk paling atas dapat meraba balok utama sehingga dapat membayangkan kekokohnya.



Suasana persidangan DPR RI, Ruang Rapat Paripurna II



Posisi tempat duduk di panggung ruang sidang utama.



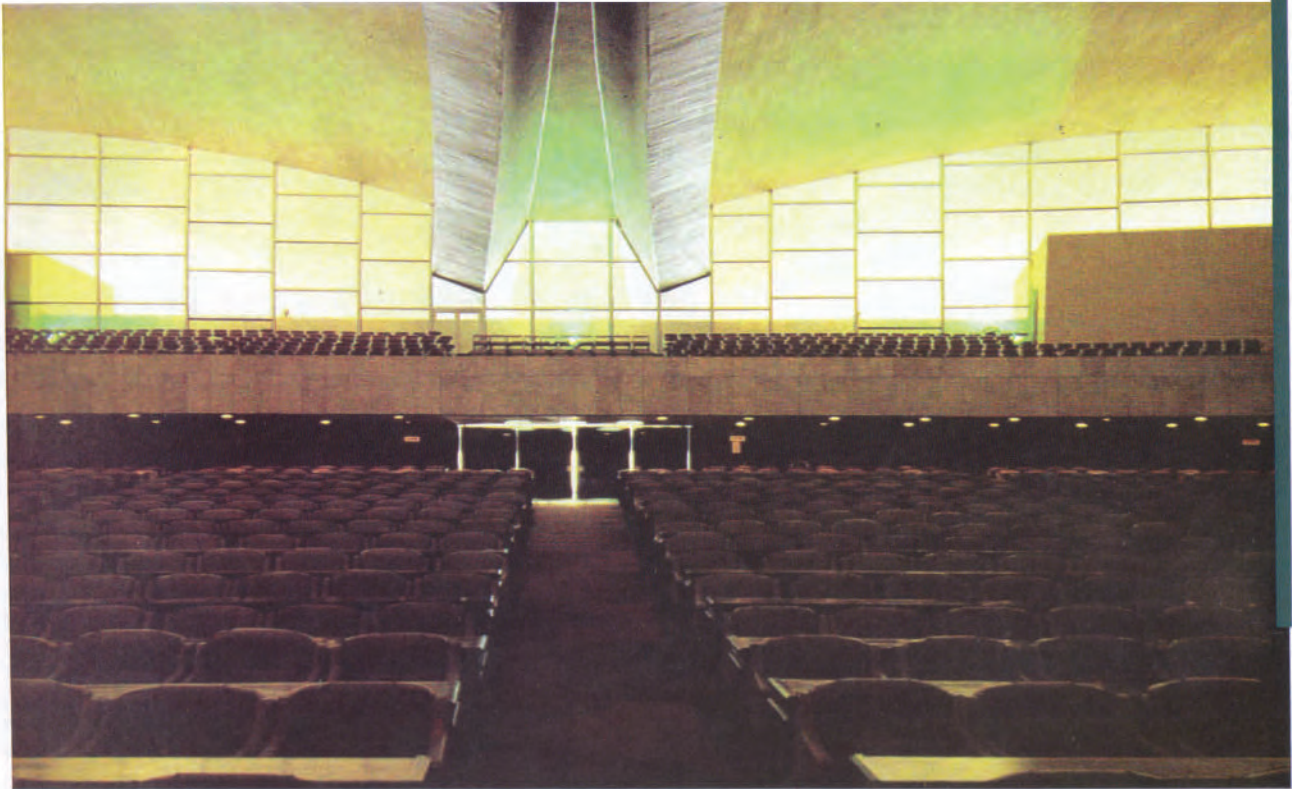
Mural di dinding ruang sidang komisi III/Wacanasabha, karya Sadali berjudul "Kesaksian".



Suasana tempat duduk para wakil rakyat dan para undangan di balkon, yang disusun dengan tepat dengan satu garis lengkung.



Elemen estetika di ruang komisi V/Wacansabha V. Relief berjudul "Semangat Gotong Royong", Karya But Mochtar. Seperti rancangan di ruang sidang lainnya, rancangan ini pun bertujuan menciptakan dinamika pada permukaan dinding kosong yang cukup besar ukurannya.



Penerangan alami di sekeliling atas ruang sidang utama menghasilkan efek yang dramatis pada balok pendukung utama atap kubah ruang sidang.



Hadirin yang duduk paling atas dapat meraba balok utama ini sehingga dapat membayangkan kekokohnya.



Balok pendukung atap kubah ruang sidang utama yang perkasa, juga indah.





Komposisi geometrik yang rapi, tepat dan polos ditingkahi cahaya dalam iklim alami sebelum memasuki ruangan berpendingin buatan.



Elemen Estetika

Sebagaimana sudah dipahami, untuk mendukung keindahan sebuah bangunan diperlukan berbagai elemen tambahan. Elemen estetika yang terdapat pada kawasan ini sejak awal dimaksud agar mampu menyatu dengan kandungan falsafah arsitekturnya. Elemen estetika utama yang menonjol di plaza adalah sebuah patung kontemporer karya But Mochtar. Patung tersebut melambangkan penjelmaan manusia Indonesia yang hakiki, kehendak-hendak maupun harapan yang ditampilkan lewat lembaga perwakilan rakyat dalam perjalanan melalui dimensi masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang. Ketiga-tiganya bakal terjalin erat, terdiri dari sebuah konstruksi rangka besi berlapis perunggu. Elemen estetika di tengah plaza tersebut merupakan elemen pemegang. Dalam arti, karya ini bakal tampil selaku pengukuh dan pembatas keseluruhan bangunan yang terletak di sekitarnya. Sehingga jika elemen itu tidak ada, akan mudah sekali ruangan yang terdapat di sekelilingnya tak menentu arahnya. Hal ini bakal mengakibatkan sukar ditemukannya kembali skala manusia, sebagai akibat dari tidak jelasnya dimensi dan arah. Kecuali patung kontemporer di plaza depan, berbagai ragam karya seni lain juga ikut menghiasi ruangan-ruangan tertentu.

Sebuah pahatan timbul dari bahan kayu jati, berukuran 5.00 kali 2.50 meter karya Sri Hadi, mengambil tema "irama sebuah kebun bunga". Kemudian

semangat "gotong royong", falsafah khas Indonesia, diungkapkan But Mochtar dalam bentuk relief dengan teknik las dari bahan tembaga, dilengkapi lukisan dinding pada ruangan sekretariat karya Sadali bertema "kebun keadilan". Sekelompok seniman dari Departemen Seni Rupa ITB menyumbangkan relief "awan" yang diletakan di lantai dasar lobi gedung persidangan. Mereka menyebutkan, "awan mengingatkan kepada kebebasan gerakan yang dinamis namun terarah dalam disiplin serta kesatuan memadat. Dari kesatuan tersebut, bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia serta makhluk-mahluk lain yang menghuninya memperoleh daya kehidupan". Gerakan awan diharapkan bisa mencerminkan harapan-harapan seluruh warga masyarakat Indonesia yang tersebar luas dalam berbagai pulau dan daerah, kepada kegiatan yang mereka percayakan kepada para wakilnya di gedung tersebut.

Masih terdapat dua relief lain ikut mempercantik Gedung MPR/DPR. Relief "Batu-batu pembangunan" selaku unsur visual estetis di dinding Pustakaloka serta relief yang tersusun dalam bentuk bidang – bidang lengkung sebagai pola yang diulang-ulang, mengesankan kelembutan dipadu oleh gerak serba dinamis. Untuk bisa semakin mempercantik suasana, Gedung MPR/DPR masih dilengkapi oleh dua buah lukisan yang bertolak belakang dalam gaya. Sebuah lukisan dinding abstrak karya Sadali berjudul "kesaksian" serta lukisan tradisional Bali menampilkan epos terkenal, kisah Ramayana.



Elemen elemen estetik ini digubah oleh Kelompok tersendiri dari staff pengajar Departemen seni rupa, ITB. Ujud dan Komposisinya yang didominasi oleh unsur Geometric merupakan penyesuaian terhadap Karakteristik umum bangunan – bangunan MPR/DPR.

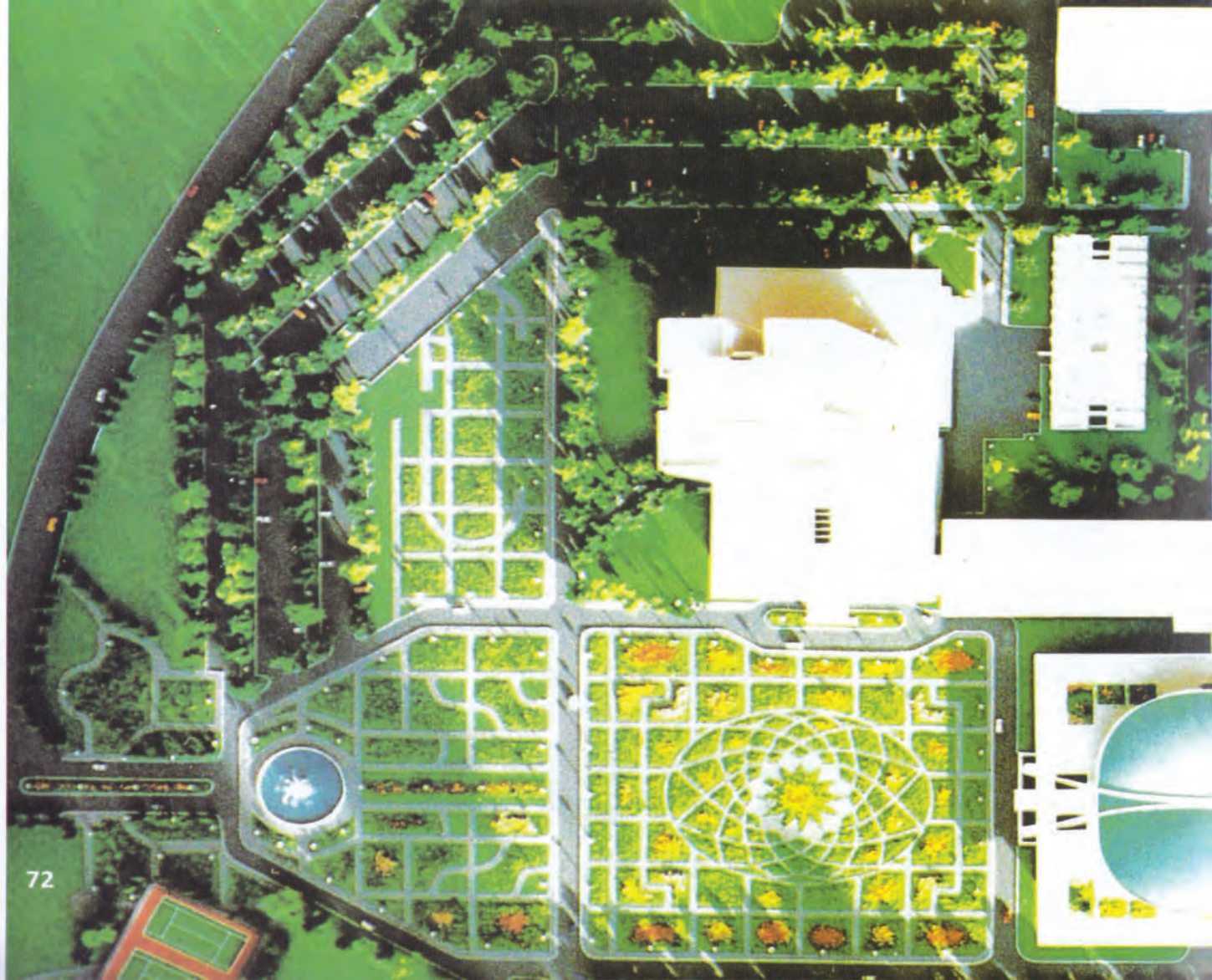


Elemen Estetika karya But Muchtar menggambarkan DPR masa lalu, DPR saat ini, dan DPR masa depan sebagai satu kesatuan.

Maket Gedung DPR/MPR RI









CHANGING THE WAY WE LIVE
AND WORKING TOGETHER TO MAKE IT BETTER

Menghadapi Perkembangan Zaman

Sejak awal, pemerintahan orde baru mrenekankan pembangunan ekonomi. Pilihan ini merupakan konsekuensi ketika harus menghadapi kenyataan morat-maritnya situasi perekonomian nasional sebagai warisan yang harus mereka terima. Dengan pilihan tersebut, akhirnya tercapailah tingkat pertumbuhan yang cukup mantap untuk bisa mengantarkan bangsa Indonesia ke tahapan tinggal landas. Hal ini semakin dipercepat dengan datangnya era globalisasi pada dasawarsa tahun 80-an. Berbagai kota di Indonesia mulai ikut berkembang, mereka saling bergerak untuk bisa rmemperluas diri sambil terus berusaha meremajakan bagianbagian kota mereka masing-masing. Sebagai ibukota, Jakarta segera tampil pada barisan paling depan dalam setiap sisi kegiatan. Hal ini secara langsung ikut mengubah situasi di sekitar lingkungan tempat keberadaan bangunan-bangunan lama. Di berbagai penjuru wilayah Jakarta yang selama ini terbiarkan kosong, mulai bermunculan berbagai ragam bangunan baru yang bisa memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan majemuknya warga kota. Lahan-lahan tersebut juga mulai diperlukan, sebagai wadah memberikan pelayanan terhadap warga kotanya. Melalui tingkat pertumbuhan sangat tinggi, tanpa terasa Jakarta sebagai kota yang sudah berdiri

sejak tahun 1527, telah bertumbuh menjadi suatu metropolis, mekar dengan berbagai macam lingkungan baru. Dengan berbagai kota satelit yang terus-menerus bertumbuh di sekelilingnya. Tidak terkecuali, di dalam jantung kota itu sendiri, Jakarta juga mengalami perkembangan pesat. Beragam upaya peremajaan serta pembangunan-pembangunan baru, terus menerus dilakukan. Ini semua dilakukan sebagai salah satu jawaban terhadap meluasnya kebutuhan yang juga terus menerus ikut berkembang. Dampak dari segala macam perubahan tersebut juga mulai menyentuh kepada keberadaan kawasan Gedung MPR/DPR. Ketika pertama kalinya dipakai, kawasan tersebut merupakan gugusan bangunan cukup megah, terletak di tengah padang rerumputan hijau yang teramat lega. Tetapi, dalam perkembangan zaman, kompleks tersebut tanpa terasa secara perlahan mulai dikepung oleh sejumlah bangunan tinggi dan besar.

Hal ini mau tidak mau telah ikut menyurutkan suasana kemegahan tersebut. Dengan demikiah, kawasan bangunan yang semula serba lega mulai terasa sempit. Kawasanya mulai terkurung antara berbagai macam bangunan-bangunan baru. Rasa khawatir akan terus menyusutnya perhatian terhadap masa depan kawasan MPR/DPR dalam menghadapi perkembangan zaman, telah mendasari diselenggarakannya seminar bersama untuk membicarakan hari depan kawasan tersebut.

Seminar tersebut diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia bersama Sekretariat Jenderal MPR/DPR pada bulan September tahun 1992. Para peserta seminar mengambil kesimpulan, sudah waktunya ditetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah tetap, wilayah yang harus dilestarikan selama-lamanya untuk kawasan gedung MPR/DPR, selama bangsa Indonesia berdiri. Sasaran dari keputusan tersebut sangat luas. Suatu keputusan strategis dari sebuah bangsa yang ingin memiliki kawasan yang bisa menjadi lambang kedaulatan rakyat dalam negara yang berdasar Demokrasi Pancasila, sebagaimana yang mereka cita-citakan. Dalam jangka panjang, keputusan ini akan ikut mempengaruhi perencanaan penataan ruang kota Jakarta, dimana sudah menjadi keharusan kawasan yang menjadi kebanggaan rakyat tersebut ditata agar sesuai dengan martabat dan sifat lembaga tertinggi dan tinggi negara yang disandangnya.

Dengan demikian, perlakuan terhadap kawasan ini dalam tata ruang kota, selayaknya sama kuatnya seperti yang berlaku di kawasan sekitar Monumen Nasional, yang telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Langkah semacam itu perlu agar seluruh lingkungan di sekitarnya diharapkan dapat tumbuh sebagai pendukung. Bukan malahan menutupi kompleks yang teramat penting tersebut. Sehingga pemilikan masyarakat Indonesia terhadap lembaga kedaulatannya ini perlu diusahakan dengan berbagai cara penataan ruang.

Agar bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini, kawasan Gedung MPR/DPR sekarang ini harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi segala macam kegiatan kemasyarakatan, di luar kegiatan-kegiatan resmi. Sebagaimana dulu diimpikan oleh perancangnya, kawasan tersebut dewasa ini membuka diri sepenuhnya menyambut kunjungan – kunjungan wisata, perlombaan, olahraga, rekreasi, latihan kebugaran jasmani serta penyelenggaraan pameran, baik di dalam gedung maupun yang berada di luar gedung. Malahan telah ditetapkan untuk memasukan kawasan tersebut dalam daftar objek kunjungan wisata Jakarta.

Kecuali itu, kawasan ini pun semakin dilengkapi dengan beragam fasilitas baru. Sebagai salah satu unsur penunjang utama, sejak tahun 1982 Sekretariat Jenderal DPR telah memiliki bangunan gedung tersendiri, dan pembangunan gedung baru untuk kantor anggota DPR. Sebagai bangsa yang selalu ingin menjunjung tinggi demokrasi, adalah wajar kalau kita selalu memberi tempat yang terhormat kepada Anggota MPR/DPR/DPD sebagai badan legislatif. Agak berbeda dengan negara-negara lain yang sudah memiliki kawasan khusus tempat sebagai Lembaga Negara Legislatifnya yang dirancang sejak awal sesuai dengan fungsinya. Kita memang telah mengalami perjalanan yang berlainan.

Namun, perbedaan tidak selalu harus menyurutkan

kehadiran. Kehadiran Gedung MPR/DPR sewajarnya diterima sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini. Kehadirannya perlu dilestarikan untuk membuktikan, bahwa kita memang selalu bersedia memberikan tempat serta menjunjung

tinggi sepenuhnya prinsip kedaulatan rakyat. Pada masa lalu, dimasa kini dan seterusnya untuk masa-masa mendatang. Zaman bisa berubah, tetapi kedaulatan yang diamanatkan dari rakyat akan tetap selalu abadi.



Gedung DPR saat siang hari, pelataran digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pegawai.

Nama-nama gedung di kompleks DPR RI saat ini

Pada tanggal 8 September 1998, Pimpinan DPR/MPR RI menerima surat dari salah satu Anggota DPR/MPR yang mengusulkan agar nama - nama Gedung DPR/MPR RI, yang tadinya menggunakan Bahasa Sansekerta, diganti dengan nama/istilah dalam Bahasa Indonesia. Tanggal 10 November 1998, Pimpinan MPR RI menerima surat dari 219 Anggota MPR RI yang mengusulkan agar nama-nama Gedung DPR/MPR RI diganti dengan nama/istilah dalam Bahasa Indonesia.

Salah satu keputusan dalam Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 18 November 1998 adalah membentuk Tim Penggantian Nama-nama Gedung DPR/MPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Ibu Hj. Fatimah Achmad, S.H dan anggotanya terdiri dari unsur Anggota Fraksi-fraksi DPR RI dan unsur Anggota Fraksi-fraksi MPR RI. Rapat Tim Penggantian Nama-nama Gedung DPR/MPR dimulai tanggal 4 Desember 1998. Dalam rapat yang terakhir tanggal 14 Desember 1998 diputuskan antara lain menyetujui penggantian nama gedung – gedung DPR/MPR RI sebagai berikut:

1. Gedung Grahatama menjadi Gedung Nusantara;
2. Gedung lokawirasabha Tama menjadi Gedung Nusantara I;
3. Gedung Ganagraha menjadi gedung Nusantara II dan Gedung Nusantara II Paripurna;
4. Gedung lokawirashbha menjadi Gedung Nusantara III;
5. Gedung Pustakaloka menjadi Gedung Nusantara IV;
6. Gedung Grahakama menjadi Gedung Nusantara V;
7. Gedung Samania Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI;
8. Gedung Mekanik Graha menjadi Gedung Mekanik.

Selain delapan gedung tersebut di atas, di kompleks MPR/DPR RI sekarang juga berdiri sebuah Masjid Besar yang diberi nama Masjid Baiturrahman. lempat beribadah bagi umat Islam ini dibangun dengan swadaya masyarakat dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1997 oleh Wakil Ketua MPR/DPR RI, Wahono.

Penutup

Demikian sekilas informasi tentang Gedung DPR/MPR RI tempat wakil-wakil rakyat mengemban tugasnya.

Dengan mengetahui latar belakang pembangunan gedung, nama-nama gedung, arti dan makna gedung, relief, patung dan lukisan yang ada di Gedung DPR/MPR RI ini, kita dapat menghargai karya bangsa sendiri sebagai perancang, pembuat, pemilik dan kegunaan gedung rakyat.

Semuanya yang terdapat di gedung DPR/MPR RI ternyata mempunyai arti dan makna yang dalam, mulai dari simbol-simbol harapan seluruh rakyat, falsafah kehidupan bangsa dan cita-cita rakyat Indonesia.

Masing-masing elemen, ornamen, patung dan relief mempunyai andil dalam mendorong dan menumbuhkan semangat wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia. Sebuah harapan dan cita-cita paling hakiki yang tumbuh dari seluruh isi Gedung DPR/MPR RI.

Gedung DPR/MPR RI adalah karya bangsa Indonesia yang menggunakan bahan-bahan dari kekayaan alam bangsa Indonesia sendiri dalam meneruskan pembangunan nasional dan menyongsong hari depan yang lebih baik.

Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi masyarakat dalam mengenal arti dan makna Gedung DPR/MPR RI.

Soejopdi Wirjoatmodjo Dipl.Ing (1927 -1980)



Lahir di Rembang (Jawa Tengah) sebagai anak keenam dari dua belas bersaudara, Soejoedi Wirjoatmodjo pada awalnya nyaris tidak akan sempat bisa menjadi seorang perancang bangunan. Karena begitu perang kemerdekaan meletus, dia segera meninggalkan bangku sekolah untuk terjun langsung ke medan pertempuran bersama para gerilyawan, bergabung

dalam kasatuan tentara pelajar dan sempat meraih kedudukan kepala Staf T.P. Brigade 17 Detasemen II Rayon V, Solo.

Kariernya tidak berlanjut, karena sesaat sesudah pengakuan kedaulatan, Soejoedi menyatakan keluar dari dinas militer agar bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung (Jawa Barat), sebagai mahasiswa Fakultas Teknik bagian arsitektur di Universitas Indonesia (sekarang, Institut Teknologi Bandung). Sejak berada di kota itu bakatnya mulai nampak. Sekalipun untuk bisa menutup biaya kuliah, dia harus membuka diri dengan mengerjakan rancangan rancangan rumah tinggal. Tetapi, kesibukannya dalam mencari uang sama sekali tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Bahkan kemampuannya dalam menangani dua macam tugas secara bersama, menyulut kekaguman Prof V.R Van Romondt, Ketua Jurusan Arsitektur.

Sebelum studinya selesai, tahun 1954 Soejoedi memperoleh beasiswa dari pemerintah Prancis untuk memperdalam bidang arsitektur di *Ecole Superieure National Des Beaux Arts* di Paris (Prancis). Studi lanjutan tersebut diteruskannya ke *Tekhnische Hooge School* di

Delft (Belanda) dan selanjutnya dia tuntaskan sampai berhasil mencapai gelar Dipl. Ing. dengan predikat *Cumlaude* di *Tekhnhische Univesitat West Berlin* (Jerman) pada tahun 1960.

Kesibukannya pada saat memperdalam ilmu arsitektur, sama sekali tak mambatasi inspirasi Soejoedi dalam merancang bangunan. Diantara waktu mengerjakan tugas di kampus, dia bekerja selaku desainer pembantu di Biro Arsitek *Kraaivanger, Rotterdam* (1957), kemudian di Biro Arsitek *Kasper, Freibrug* (1958) sampai akhirnya menjadi arsitek pada Biro Arsitek *Hentric Patteching, Dusseldorf* (1960-1961).

Setelah kembali ke tanah air Soejoedi langsung dipercaya menggantikan kedudukan Prof. Van Romondt sebagai Ketua Bagian Arsitektur ITB. Jabatan ini terus menerus dipegangnya sampai tahun 1967, ketika tahun 1962 Indonesia ikut serta tampil dalam New York World Fair (AS), Soejoedi ditunjuk selaku ketua tim desain paviliun Indonesia. Namun karena sesuatu hal yang tidak pernah diumumkan secara terbuka, dia akhirnya mengundurkan diri dari kedudukan tersebut. Baru nanti tujuh tahun kemudian, Soejoedi tampil sebagai ketua nasional di desain centre paviliun Indonesia untuk expo 70 di Osaka (Jepang).

Pada mulai tahun 1965, sewaktu pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan Kompleks Conefo, rancangan Soejoedi dengan bantuan perhitungan kekuatan bangunan dari Ir. Sutami, berhasil memenangkan sayembara. Pada tahun itu pula dia langsung ditetapkan selaku Ketua Tim Desain Proyek Conefo. Rancangan gedung tersebut, yang sekarang ini dikenal dengan nama gedung MPR/ DPR sering disebut sebagai salah satu karya master piece-nya.

Menurut Soejoedi, saat seorang arsitek menerima

tugas, dia harus bersedia memanunggalkan diri dengan seluruh permasalahan yang bakal muncul. Seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam, karya manusia pada hakekatnya juga sekedar bagian dari alam. Oleh karenanya, seyogyanya sebuah karya tidak harus menimbulkan disharmoni dengan alam sekitarnya maupun disharmoni dari manusia calon pemakainya. "Karya selalu memanifestasikan jagad cilik (dunia kecil). Tetapi jagad cilik bila tidak ada kaitanya dengan jagad gede (dunia besar) juga tak ada artinya" kata Soejoedi. Jagad cilik adalah bangunan gedung yang harus mampu menunjukkan keselarasan, kewajaran, kegairahan, dan kemanusiawian. Sementara itu, bagian dari luar gedung juga harus tetap sanggup menampilkan keserasian,

kewajaran, kegairahan, dan kealamian dengan seluruh situasi di sekelilingnya. Berdasar hal tersebut, sebelum mulai berkarya maka pribadi si arsitek lah yang harus terlebih dahulu dibenahi. Mengingat kenyataan, karya arsitektur sekedar manifestasi dari sikap hidupnya, dari kemandiriannya. Oleh karenanya, karya arsitektur bakal selalu berkait dengan kepribadian dari sang arsitek.

Arsitek pendiam tapi selalu kokoh pendiriannya tersebut meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Soejoedi Wirjoatmodjo meninggalkan Hadimah, isteri yang telah dikenalnya sejak masa perang kemerdekaan, tiga putera dan seorang puteri.

**Prof. Dr. Ir. Sutami
(1928-1980)**



Menempuh pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahirannya di Solo (Jawa Tengah), dia lulus sebagai insiyur sipil ITS Bandung (Jawa Barat) tahun 1956. Sejak awal, Sutami dikenal sebagai anak cerdas. Angka-angkanya dalam mata pelajaran ilmu pasti dan mekanika selalu baik. Sementara itu minatnya terhadap ilmu teknik sangat besar, sehingga dia tampil menonjol dalam mata

kuliah mekanika dan konstruksi beton. Memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjja Mada Yogyakarta kemudian dikukuhkan sebagai profesor di Universitas Indonesia Jakarta. Sebagai seorang ahli teknik, pengalaman Sutami sangat lengkap. Semasa masih menjadi mahasiswa, dengan status mahasiswa ikatan dinas NV Hollandsdhe Beton Maatschppij, dia sudah bekerja paruh waktu sebagai guru mekanika teknik di STM, dilanjutkan asisten mata kuliah bangunan air dan mekanika tanah di ITS serta asisten konstruksi beton pada Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Sandung.

Mengawali karir dengan bekerja di NV HSM, Sutami langsung dipercaya sebagai pelaksana proyek penjernihan air di Pejompongan, Jakarta. Karirnya dalam perusahaan tersebut terus meningkat sampai akhirnya meraih kedudukan direktur pelaksana. Ketika pemerintah Indonesia menasionalisir perusahaan-perusahaan Belanda sebagai akibat persengketaan masalah Irian Barat (kini Papua), Sutami ditunjuk memimpin PN Hutama Karja (1961-1966). Sejalan dengan itu, keterampilan profesinya ikut menanjak.

Dimulai dengan me-megang pimpinan pusat proyek pembangunan Jembatan Musi di Palembang (Sumatera Selatan) sampai nantinya menjabat komandan komando proyek Conefo di Jakarta.

Karier Sutami dalam pemerintahan diawali pertengahan tahun 1965 dengan menjabat Menteri Negara Kabinet Dwikora untuk urusan penilaian kontruksi. Meskipun kabinet silih-berganti, Sutami tetap memperoleh kepercayaan, baik dari Presiden Soekarno dilanjutkan nantinya oleh Presiden Soeharto, untuk memegang jabatan menteri. Terakhir, dia adalah Menteri Pekerja Umum dan Tenaga Listrik Kabinet Pembangunan II (1973-1978).

Sementara itu, dalam lapangan lain, karier Sutami antara lain tercatat sebagai anggota Lembaga Riset Nasional, Pembantu Dekan Fakultas Teknik UI dan juga sempat menjadi anggota MPR Rio Sebagai seorang ahli teknik Indonesia, Sutami mencatat kepeloporan dalam penggunaan konstruksi beton pratekan ketika dia membangun Jembatan Semanggi. Ia juga menjadi pelopor penggunaan teori *ultimate strenght* desain sewaktu meyelesaikan pembangunan gedung Conefo dan tampil selaku pelopor penggunaan elektronik data processing dalam perhitungan-perhitungan teknik di Indonesia.

Meskipun sejak tahun 1977 Sutami sudah terbaring di rumah sakit karena kanker darah, semangatnya untuk memberikan sumbangan sebanyak mungkin kepada kemajuan ilmu teknik tidak pernah menyurut. Tidak kurang 17 karya ilmiah berhasil dia selesaikan selama menderita sakit. Pekerja ulet yang tak pernah banyak ngomong ini tutup usia pada tanggal 13 November 1980, meninggalkan seorang isteri dan lima anak. Sutami dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam pembangunan

D. Soeprajogi • Soejoedi. Dipl. Ing. • Ir. Soenarjo Sosro • Ir. Soedijanto • Ir. Lie Toan Hong • Ir. Toto Atmodiwirjo • Han Hoo Tivian Dipl. Ing. • Prof. Selo Soemardjan • ProL. Ir. Go Pok Oen • Ir. Noerpointo • Ir. Oetomo Brodionoporo • Ir. Soerasa • Ir. Alexander T.H. Kandaow • Ir. Witardjo Talogo • Ir. Alibasah Samudhi • Ir. Poernomohadi • Soebugo M.S. • Juswadi Saliya • Siaw Ing Tjioe • Bambang Surjanto • Bondan Hermanto • Tjoa Kiang lie • Endah Sri Indrawati • Ach. Moersid • Darmawan P. • Liaw Tay Yin • Masnir • Nurrochman S. • Sukandar A. • Atyoso Mochtar • Ruchiat T. Ir. Mawati • Sri Rahajuh • Idawati • Aristiana • Harastoeti Rachmat Ali • Prijatna G.S. • Arjono Bernardi • Abdul Hakim B.A.E. • Darusman • Farouk Kamal • Mamun Mullia • Eka Sembada • Nandan Sanumihardja • Dibjo Hartono • Abenduan • Ir. J.B. Soemargo • Ir. Wirawan Soekirman • Prof. Ir. A. Antonio • Ir. Hidayat Notogondo • Ir. Bambang S.K. Widjaja • Ir. lie Gwan Sioe • Ir. Z. Harahap • Ir. Sri Indraswari • Ir. Soeharto P. • Ir. Soejoko • Ir. Daruslan • Ir. Ny. Kho Kiern Wue • Ir. Tjia Keng Peng • Soekarsono. B.E. • Ny. Utami Suharto • Djakarja • Murdjani Sjahtra • Moch. Muljono • T. Sulaeman • Hardjono • Iskandar • Partostarisno • Nasir • Sutopo Pranowo • Harry Bachtiar • Soeiginar • Ir. Moch. Joesoef • Ir. Komarussaman • Ir. Darmawan Saleh • Usman Sjafir • Waras, B.E. • Tjahnjono, B.E. • Ir. Bolti • Ir. G011W Tek Kim • Nana Soejarna • Sedarmar • Sudono • Sjamsuir M. • Uhi Sumarsono • Ir. Lie Tjong Kang • Ir. Sutanto Irawan • Ir. Ong Djin Oen • Ir. Hardjono Soekarnaen • Zainal Abidin • Harry Bachtiar • Ir. Moeljadi Sosrosobro • Ir. Haroen • Ir. Harris Sutakarya • Ir. Soejiyanto • Ir. Eko Soemanto • Amas Soetikjana • Ati Soeprapti • L.F. Soebugo • Eddy Suratman • Ir. Sulkan Sumintapura • Eddy L. Soetikno • Soeaworo • Slamet Rahardjo • Soehata Rahardjo • Soebugo • Soedarsin • Soepranto • Soekajoko • Tjokrohadisoesilo • Thio Tjoe Gwan • Hasan Alvdynadi • Hoedoro • Ir. Ranjeto Sastrowardoyo • Ir. Sri Bagjo • Ir. Soegihardo Soejiyoko • S. Brolokoesoerno • Sapon Hancloso • Wagijo • Ir. Iwa Soemarmo • Ir. Indrawan. R. • Ir. T.M. Hutagalung • Han Hok Lian R.E. • Koesnadi • M. Snekada • Nursin • Oban Lubis. B.E. • Pudji Sarbingu • Soetomo • Sunarko • Sugirmin • Dijono • Ir. Slamet Wirasondjaja, M.L.A. • Darjanto • Hendro Tjahjono • M. Zaini A.R. • Mandi • Rio Rachwartono • Robi Soelarto • Basuki • Hartimingsih BAP • Slamet • Soetjipto • Soenarnan K. • Soehoedi • Supangat, BAP • Wajoedi • Iskandar Junus, B.E. • Sofian Madlan. B.E. • Supandi • Ir. Woerjatno • Harun Effendi • Nursalam • Kamsol • Soerantoro Soekarmo • S. H. Saesjir Sama • Soerdjais B.A.E. • S.B. Dalimin • Soemanto • Soenarto • Padjjan • P. Darminto • Samekto Subekti • M. Mursidik • Drs. Sjahrudin Hadi • Soerantoro Soekarmo • S. H. Saesjir Sama • Soerdjais B.A.E. • S.B. Dalimin • Soemanto • Soenarto • Wagiman S. • Syamsul Maarif • Dhewi Suhito • Haksomo Kartohadikusumo • F.X.H. Soejati • R. Noni Tjioe • Sri Budi Utami • Snebadio • Soetrismo • Dr. K. Kresna • Dr. Trijono • Herisamsita • Sitti Oetari, B.A. • Ir. Pandegiroi • Ir. M. Junus • Sugiharjo, B.E. • Aswoto • Raswoto • Wibowo • Achmad Fauzi • Matsani • Ir. Hamzah Junisri • Tadjudin • Sunarman Kartosuprodjo • Sumarto • Ir. Sjamsudin Malawa • Ong Siang Wie • Dr. Didin S. • Ir. Radimin Darmoso • Bijanto • Oong Soma • Tjakra Sugiaro • Ir. Zahrial • Soedkiman • Kodrad • Hendro Harjono • B. Budiadi, B.E. • Ir. Bugados Mudiantoro • tr. B. Siahaan • Ir. Supranto • Bambang Irawan • Badawi Kamal • Ir. Aminudin • Kudung B. Hasan • Taman B. Tasa • Ir. J.P. Cho • Hadi Walujo • Ir. Achmad Ali • Ambudiono • Narjono • Hardilan • Ir. Hidayat Notogondo • Helmy Imran • Godi K. Kalsid • Jusman Aputra, Bsc. • Juslif Iatnadjad • Sudrajat • Soekabdi • Agustinus Gah. B.A. • Ny S.R. Soetjahjo • Sukardjo • Soerono • Omudin Sjamsu. A. • Rivai Amin • Rumawan • Ir. Rohafah Arsjah Dahar • Ir. Rinanto Roesma M. Arch. • Ir. Rudoto • Rijadi Jodorolbroto • Nasri Dahlan • Muhidin Saidi • Nakoelo Soenarto, Dipl. Ing. • Moerdijanto • Gyn. Mansur • M. Martinus • Marsono • Martono • Mawoto Poerwokoesoemo • Muljono • Pratikno Salliman • Sianturi J. • Pramico • Lie Mok Lit • Lahnardi Subagio • Lukito Rahardjo • Ny. Salman • Iman Sunaryo • Nandang • M. Nuch • Nurhida • Nirman B. Wongsodiwirjo • Nurjanto • Winardi Soekowijono • S. Diro Soekijo • Effendi Zen • Koestomo • Endon • Ir. Daruslan • Djohar Ajub • Ir. Djokosampoerno • Djoko Mintarso • Oeddy • Drs. Sjahrudinndi • Soekarsono, B.E. • Triwindu Rahardjo • Ir. S. H. Saesjir Sama • Soerdjais B.A.E. • S.B. Dalimin • Soemanto • Soenarto • Saronto • Nasim S. • Ir. Zaennudin K. M. Arch. • Ir. Askito As. • Baskoro Sardadi • Ir. Bambang Panudjo • B.E. Djedy Suwardi • Neuliman • Rusli Otoluwa • Ir. Siti Ularnini • Ir. Sugeng Rahardjo • Ir. Soenarjo Danu • Mihardja • Soewondo, Dipl. Ing. • Susetyo Hadi • Ardi Pardiarn • Zachri Zunaed • Ir. Boen Tay Tjiang • Ir. Ibrahim Razali • Ir. Moch. Sahari • Ir. Rochadji Djapar • Drs. A. Sadali • Drs. A.D. Pirous • Drs. Adjat Sakri • Ors. Anyhama • Widagdo. Dipl. Ing. • Amzar • Drs. But Mochtar • Drs. Eddie Karta Soebarna • Hariadi S. • Jetty Subijanto • Drs. Jusuf Effendi • Drs. Kabeol • Komar • Ors. Mochtar Apin • Rita Widagdo • Drs. Srihadi S. • Drs. Soedjoko • Sidharta • Surja Poernama • Soenarjo • Sjahir Kader • Suhaja • Sardjam • T. Soetamto • Asan Amran • Aman • Dudung S. • Ii Suherman • Maman Muljana • Nanang • Sri Hidayati, SH. • Tetet Sutarsih Udas • Ir. A.E. Nobel • Djuber Suhero • Djono K. Wahjudi • Jusman Aputra, Bsc. • Ir. Soekrisno Ramelan • Soetrismo H.S. • Sugito Effendi • Suwandi • Soemarto • Wagiman M.S. • Zulaibadah • Ir. Soesanto Soeodibo • Anas Isrin • Ir. Butje Sinay • Duwe Adiningrat • Ir. Djunaedi Alwi • Ir. Gatot Soenarjo • Eddy Abdul Wahab • Husin Jusuf • Ismojo Harjanto • Johannes Tarigan • Ir. M. Safel • Ngimanto • Ir. Oh Hol Djoen • Ir. Sriyono • Mustadjab IK. • Tubagus Haedar Ali • Soeogeng • Soemarso • Simin • Soenarno • Sidharta Kamarwan • Sardjoe Moenanard • Ir. Tjok Darmajuda • Ir. Tjio Kiang lie • Ir. Tranggono • Ir. Moeljadi Koesalimwadi • Ir. Roekimin • Hartono, B.E.E. • Sujudi. B.E.E. • Soetrismo • Surjadi • P. Siregar • Murtiadi • Suparmin • R. Hartono. B.E.E. • Effendi • Saleh Hadi • Mientardi • M. Argasasmita • P. Margono • Ir. Sjaban A. • Ir. Haryoso Soedarsono • Supjartjo Tjokro • Abdul Gafar Safie • Sjuab S. • Soeobiyanto • Sjaefoedin • Sarmad Mudia • Soemardi • Partono • R. W. Masduki • Ir. Julius Rochman Marjono Manguntaja • Ir. Hamsjang Junisri • Dalitti Machmud • M. Jazid • Gafar R. • Anizon • Sardjono • Widodo Roelian • Malan Prajnto • Mudjais Trisioa Santoso • tr. Hendarin Hendro • Ors. Sjafir Soedomo • Kiri Soen Hwie • Martolo Kunto SH. • Ong Djin Jie • Jusuf Harahap, SH. • Frans Z. • Tjoa Tjong Tjoan • Drs. Praso • Soeprario • Widodo Alibasah, SH. • Sugito Ratmodjo • Ir. Sjamsudin Hatawa • Junjo Partono • Drs. Ir. Poernomosisi H. • R.M. Hadjiwibowo • Ir. Kartono Pinandjo • Ir. K. Mandagi • Ir. Pramoejdi • Ir. B. Tampubolon • Ir. Tjeng Sih Gie • Hoessin Asegat, A.C.A. • Ir. Soedjono Karmadibrata • Ir. Januar Hakim • Ir. Soearto Kartono • Soemartjo, Msc. • Wahjudi, Dipl. Arch. • Ir. Kusumastuti • Moch. Isnaini, Msc. • Ors. Salomono Suharjo • Ir. P. Sihombing • Brig. Jend. R. Soedrajat • Drs. Na Swan Gie • Drs. Soewarto • R. Soeparno Darmosarkoro • Ors. Sundanu • Drs. Soejatno • Drs. Mochtar Azharl • Dra. Bully Bulis • Drs. Jodhy Setyawan • Supranto • Drs. J. Moenir • Ny. Mudjahj • A.H. Adamy • Drs. Amir Sjafirudin • M. Djamil, SH. • Agussalam L. • Soetojo • M. Titahelu • Martedjo • Bachtun • Drs. Soeigto • Drs. Soebugo • Taufik Mochtar • Dudin Sullnsa • Sarit Stittingbang • J. Ticoalu • Major Soeratin • Hasan Basri • Tr. Tinjan Jan, SH. • M. Karso • Karmin • Drs. Martedjo • DI. Parente • Soeijatno Soemardjo • Drs. Soedrajat Notowalogo • Sakimin • Badu Butar • Butar • Sauri Mauli P. • Koesno • Achmad Mursidin • Abdoerachim • Rasam • Ashari • Soemon Nanang • Subuni Anwar • T. Iskandar • Sjafile • Pang Hoei Djin • H.M. Titahelu • Amir Hasanuddin • Suwudjo • Lik Driyadi • M. Ngabdi • Arswaijaya • Sugiyanto • Flansius • Djeari • Soimin Kusnoto • F. Sri Hartati • Romli Abdulkadir • Rd. Moeliono • Moch. Noer • Katino • Kasim • Murdjiah • Drs. Satoto Darmosarkoro • Siswati • M. Jusuf Zainal • Wardjono • Djaelani • Amir Hasanuddin • Suwudjo • E. Kowara • Let. Kol. Ir. Moenir Salim • Ir. Onno Widodo • R.H. Supri • Drs. Agus Sumardi • Drs. Susilo • Ors. A. Bratanata • Ir. Slamet Dirkam • Ir. Winanto • Drs. Budi Sulistyono • Sulasna • Sanjoto • Ir. S. Danunagoro • tr. Ida Bagus Oka • Achdias Saleh, BA. • Drs. J. Idat • Major Soepranto Tjiljoedjo • Sutrisno • T. Hutagalung • Ir. Tjung Fat Khiong • Drs. J. Odang • Ir. D. Adisasmita • Nn. Miske • Ny. Rita • Drs. Budi Suradji • Prapto Zaini • Bambang Subali • Pratipto, SH. • Supranto • two Ichwani • Harjono • Azwar Idrus • Mayor Maktal • Kapt. Suljito • Subagio • Fx. Suhardi • I.G. Suranto • Chaidir Rudiar • Harjo Jurjo • Nicolas Setu • Frans Frou • Arismunandar • Santoso • Sarmudji • Minto • H. Bahusni • Kattiman • Let. Kol. Ribawanur • Sudjono Respati • Major M.K. Sumarli • A.C. Tieleme • Kewusnendar • Sudjono • J. Asni • Gunawan Wibisono • Mufti Muhammad • Oetari BA • Anas Mustarom • Imam Basjjar • Sucliono • Masni • Ipati Sjafirah • Agus Budiarto • Pudiotomo • Drs. Sofjan Aswari • Sudarto • Sudiah Ali • Sriyono • Peltu Sutopo • Titik Supriyah • Nn. Sunarb • Surjo Bmtoro • Oarmo Karswijadi • Ari Subroto • S. Prapto Suhardjo • A. Madjid • Tambu Hutabatin • Lumenta Mieke • Drs. Pamungkas • Drs. Sarino • B. Arlitonang • Nurwachidi • Nn. Niniek Siti Suparni • Soetjoso • Daldiri B. E. • Mochlis M. • Agus Salim • Soemartjo • Mokali • Prawoto • A. Djuanda • Suharmadji • Didi Hadiatmo • Mardjuki • Nj. Sri Suharti • Sukelan • Abbas Kuslan • Ramdhan • Sjahril Zacharia • Aznar Madjid • Haridin • Kusnoto • Suwito • Djamalul • Ruslan W.A. • Abd. Azis Noer • Suhartaty S. • Renida Heruddin • Moechalk • A. Rachim Idris • A. Djajadi • Kandhi • Luise • Margaretha • Soendoro • Tafto Jani • S. Amal • Sjawal • Muljantjo SH. • Soedjono Respati • Ir. Manali Juja • Gunadi M.W. • M.A. Pardele • Lim Tjoen Iroy • Ir. Wang Sunjono

Mardi - W.R. Van Zuylen • Hery Pramono • Fr. Eka Suraatmadja • Purwo Sutjipto SR. • R. Mapaliev • Mathius A.S. • Pratiso Hadisurjo • Faisal Basir SH. • Sukahar H.S. • Ors. Usman Setiadi • Ir. Soewarsono • Mansur Hamzah • A.H. Lantang • Danardono • Major CZI.E.Juwono • Ir. Soepatmo • Ir. Soetami • Ir. Suplan Sumentapura • Wangsudsonio • Eko Sumanta • Eddy Suratman • Amas Sutikjana • Dudung Suhaini • Sudarman • Hary Kastanya • Pikart • Ali Usman • Uripan • Khalil • Koedarsono • Julianto • Sarkowi • Y. Heriyanto • I.N. Wenten • Ny. I.N. Wenten • Wahab • Binur Hamman • Zaini Bahri • Boim Latif • Sulastri Endang • Anna S. • J.A. Rachman • Soemarsono • Djumod • Sunarjo • Agussalam Sunarjo B.A. • M. Poespo • Satori • Thamin Lamarsa • Ir. Tan Ik San • M. Rals Suhaini • Ir. Yanuar Hakim • Ir. Sjudarmo • Ir. Soetarto K. • Usman Syarif • Ir. Soemamo • Ir. K. Mandagi • Ir. Martsanto • Ir. P. Baskoro • Ir. Rambe • Ir. Manik • Ir. Triyasa • Mido Kadri • Supadi • Suharsono • Hadidurjat • Talumewe • Dandang Kusmeri • Iubis • W. Tacasili • M.F. Apitule • Waruwu • Lutti A.M. • Marnani • A.H. Muhja • Ir.M.O. Masjauhari • Parतो • Parwoto • Hanfan Umar • Ir. Soelisty • Anneke.S. • Ir. Warsanto • Waras B.E. • Uba Romal • Utojo Rumanto • Ir. Wartaman • Ir. Wirawan Sukiman • Supoto • Sumarpeni. SH • Drs. J. Tan Thing • Soekrasno • Soekamto • Sumardi • Soepardjo • Ma. Nurchohis • 1r.Noer Tajah • Lim Tik Yang • M. Subuni Anwar • Satimo • Ir. Tjeng King Iong • Ir. Mulyadi S. • Drs. Agussalam Lamarsah • Sekarmaji • Anny Rochalini • Ir. Hie Boen Fong • Suharto • Tugiman • Ir. Sutjipto • Ir. Sugiyanto • Ir. H. Soekmoko • Ir. Moegiarso • Djarnari • H. Baryo Ahmad Musa • Herhiryo • Soehardi B. • Sumardi Sk. • Atang Sobari • Sumadi • H. Ridwan S. Oesman • Soeradiman HS. • Rusman • Siti Rowati • Sedjo Wibowo • Eduard Pangaribuan • Dibjo Soenarjo • Ir. P. Siregar • Soeparno • Saimin • Soeharto • Sudarto • Sjaffie B.A. • Sri Hartati • Soekirno • Derajad • Soewarso • Ir. Thung Liong Peng • Ir. Tan Tiang Bing • Ir. Abdul Kadir • Sulastri • Erny Sularni • Rochim • Ir. Herri Prasadjo • Sutjiwarno • Imam B. • Ir. Latif Adim • Ir. Soenaryanto P.J. • Ir. M.S. Kamal • Rarnelan • H. Iskandar • Untung • Dimin B. Trosono • Djiono • Alnan Edison Purba • Naslm Nawirejo • W. Kailola • Rahim Idris • Hasan D. Silitonga • Ispratono • Masmun • E. Surat • Soemarsingih • Suprijono, SH. • Lumbadi • M. Lagio • Moerjati • Mansjur A. • Mohamad Darmawan • Drs. Soekarno • Sudarsono, SH. • Soebjianto, SH. • Sri Partini • Soejitno • Suradji Darmodjo • Sardjono Reksonegoro • R. Siswojo, BA. • H. Samdil. • letKol. CPM Soesetio • Muharam Noeh • Major Haruh Bruche • Agustono • Lettu Mazar • AKBP MA. Moegajajar • Brig. Djen Soeharjono • Umar Gatot • Serma Achmad • R. Bandung • Sihombing • Suradiman H.S. • Bambang Sunarjo • M.S. Djajadi • Paerani • Hardowijono • Suwarjo Kasad • Kadarusman • Abdul Latief Wiwi • Pasmun A.D. • D. Soetrisna • Nj. Soetirnah • Badu Butar • Butar • Karseno • Ismail Gaoi • M.A. Kadir • Husein D. • Abdul Wahab • Soejitno • Achmad • Soeratin • Musdir • M. Husein • Sariman • Radiman • Tabri Wahid • D. Sowondo • M. Nurdin H.S. • Soetrisno • I. Soerachmad • Sadiman • Rusdi • Anang • Soedjianto • Sukri • Adin • Sukan • Sajoto • Raswadi • Soepardjo • Mamad • Sukanda • Soentanto • R. Widhiarto • Slamet B. • D. Soesanto • Wagiman • M. Kanapi • Agus Sumardi • Zakaria • Marsono • Abdul Madjid • Rikam • Hardjono • Hasan • Romli Abdulkadir • R. Lintang • Serma Kasry • Sinurat B.E. • Endang Adjun • Moh. Roekjani • Ridwan Harjadi • Sri Sutojo • Moh. Wahjoe • E.M. Mochtar • Kos Soenarto • Tarjadi • Madlias • Moekmin • Amir Hasanudrn • Ngabidi • Harun E. Abdullah • Sadwan • Warsino • N. Nainggolan • Zailani • Asrawidjaja • A. Samita • Parman • Bachram • Ratip • U. Rochman • Ridwan Umar • Ds. Diharjo H.W. • Chairul H. • Soekandar • Soekarno • Nico Pasumah • Soimin • Mudjiljan • Munadi • Karel Maulani • Soeharno • Sri Widodo • Toedjiono • Soetarli • Roesman • M. Soerachmad • Kasmin • Soentono • Soemarta • Soekanto • Muharam Nuch • Sjamsudin • Hary Hanibals • Warsoredjo • Muhammad • Suwardjaja • Soekarno • Mardani • E. Safana • Toekijo • Effendy • Mochtar • Soit • Madlani • Soedali • Soeharto • Sjahir • Adi Sembiring • Muggjo • Muhammad Atik • T. Miranto • Sanwanj • Sambasi • Sobari • Suseng • Subaih • Sujatno • Safel M. • E. Suzana • Surjono • Sahar • P. Soeparman • Sunarso D. • Sumarno • Sarwono • Suharjan • Sunjoto • Samto • Sarrnan • Suwondo H.D. • Sunarto • Suhanta • Rahardjo • Mas ud • Machbuk • Mochamad Napis • Manut Bin Djojowikarto • Mascot Taruna • Muallim • Maxsi W. • Kasilin • Ibut • Ismail Soebardjo • Mamat L.E. • Nasir Ridwan • J. Andries • Rochman • Resodwirjo • Karmin • Eddy Susarno • Z. Zubir • Rijo • Marsudi • Zalnul Salimin • Mughtaron • Joseph B. • Sanjio • Bujoto • Subagyo • Soeparno • Ambari • Sanjoto • Soentono • Sadino • Soemeri • Tutang Kumara • Mertuti • Serda Wari • Sukarno • Karto Kasmin • Kartojo • Nurdin Untung • Nawawi • Tapirantoro • Jus Torindotu • Tarjan • Tobing D.L. • I. Tarigan • Tandjung A.K. • Tutang Kumara • Mertuti • Serda Wari • Geleng Suratman, Sertu • Djueali • Wiem R. • Moral A.S. • Mugno • Musdik • Taslim • Ir. Tobing P. • M. Cen Thabri • Zaeurudin • Swatam • Sudjono T. • Said M. • Arsjad Sertu • Sudarmin • A. Salam • Sjaulkani Mahmud • Soekamto • Saimin • Susanto D. • Sartono H.W. • Djaimin • Sunarto • Sumbadijo • Soetopo • Sri Mulljan • Suparno • W. Sunarto • Soepangat • Sumadi • Simandjuntak R. • Sukarna • Sarim • Sirdiman • Sarman • Santika • Soewodjo • Suhari • Soegijanto • Soetedjo • Manut • A. Effendy • Sultjan • Maktub • Toegلمان • Sarmono • Sugiarto • M. Janis K. • Anggoro Kusih • Ichsan • Soeparni • Amat Nasan • Sedjo Muljono • Jatimin • Toegijo • Darmo Suwito • H. Soekldio • Sakipan • Sarifuddin • Dory • S. Soesanto • Trimo • S. Sumanto • Tarsipan • Zainal Mochtar • Sartono • Sartono H.W. • Ichsanuddin • Mochtar Muin • Agus Suparman • Sugondo • Nn. Soeprijatie • Nurdin A. Sanusi • Panut • Pardjono • Purnomo • E.S. Nurjanto • Ngadimin • S.A. Maulana • Milan Bin Josowikarto • Kartono • Suratmin • Hasanuddin • Ibrahim • Iksan Iskandar • Israt • Ngapio • Kassry • Kalam • Kamaluddin S. • Kajat M. • Keulman • M. Karonot • Kwek Giok Sian • Sukanto • Sabarudin A. • Sukra • Sutrisno • Sukirman • Sri Suwarsh • Supbjatna D.E. • Suwanto • T. Sumeri • Sumang • Saidi • Sukidjo • Suria • Gadir • Djurnari • M. Sunarto • Janis Kamal • M. Tukidjo • Suparlan • Daud Suhari • Djafr • Dikun • M. Wiranta • Usman Daad • Moh. Umar • Untung Rachman • Kasiran • Kukuuh Hardjono • Bambang Sugusro • Djodjo Soepardjo • Djodjo Soepardjo • Letda CPM • Jacob • Sutahig • Djaharl • Djadjujl • Umar • Warno • Ubad • R.M. Threono • Sukri A. • Letda CPM-Hendro Soetomo • Lettu CPM • Djojo Soepardjo • Djodjo Soepardjo • Letda CPM • Jacob • Sutahig • Djaharl • Djadjujl • Umar • Warno • Ubad • Unang Sadjudin • Trijono • Toray • Dr. Liem Poo Boen • Drg. Liem Poo Boen • Dr. Tjoa Koes Iem • Dr. Sadono • H. Masdur • Soewito H.M. • H. Sukarna • E. Pirngadi • Nj. Boestami • Rachim Idris A. • Dasilam B. Tarsinah • Abdullah • Slamet Djaharl • Moh. Soleh • Rakidi • Ratna Irsrijati • Kusnoto S. • Kadarisman • Luise Margaretta • Mowan • Muchamad • Kardi • Kusnadi J. • Broto • Artasim • Atmadja • Abbas • Abd.Rioni • Kol. Dr. Djaka S. • Djailani Abbas • Anda Suhanda • Z. Abidin • Udin Kopka • Edi Muardi • Mamat • Sanian • Madanin B. • Kosim • Ruswandi • Naan • Tarsa • Ibrahim • Achmad • Mawi • Raimin • Mohamad • Bastuti • Mochtar Mulin • Muksin • Nohan • Nurul Surioprodjo • Nadirin • Sjahir • Nean • Irawan Sunarjo • Samirun • Baharuddin • E. Rasjid • Samtadl • Suripno • Supardi • Lion Latit • Mathius A.S. • Sumantri • Walgito • Jacob Suparman • Diadjang Sjarrifuddin • Soeparman • Paidi • Sukardi • Suardi • Sapar • Ateng Sutisna • Rasun • Lasiman • Ichsanuddin • Agus Suparman • Sugondo • Hananung • Abdul Dja far • Turni • J. Sukardi • Simin B. • Rohim • S. Artho Soekardi • Mughtar • Marsik • Sumarno • Simon H.K. • Oei Tji San • Sukarsono • Maman Muljana • Sjawal • Sijam • Chudori • Warsito • Sutjipto • Sutinim • Salvini • Mundjahid • Mustafa • Husin Maturidi • E. Sanusi • R. Mapaliev • Uleha Djasiin • A. Karim Mondo, Serda • Sarko, Letda • Abidin Nasri, Serka • Machdum As. • Soekidjo • Serda • Nallim • Djunardi, Serka • Sukelan • A. Rachim Idris • Ir. Noeridin • Giran • Suljiwarno • Serka. Subandi • Sutrisno, Serka • Ida Damiri • Herman • Solihin Ildiwidjaja • Soemardi, Bsc. • The Kian Tjoen • Marun Sariat • Soedlman • Ir. Soelerso J. • Sudarto • Ir. Suwarno Padmodhardjo • Ir. Soeslido Hadiwijito • Slamet Amal • Soebardlo • Sardi • Slamet Harjono • Suprapto Hadisuryo • Soetarno A. • S. Soeparno • Nn. Sofiah T. • Tan Kie Liang • Tasma • Sjahir • Slamet • Suradjiirin • Tahari • Anbani G. Sadiin • S. Hadipurnomo • Bambang Nuswantoro • Subari R. • Samedja • Serda.Sairin • A. Salim • Saudi • Soetjipto • Soemarto • Ramdhan • Masdum Pranoto • R. Gunadi • Djarnali • Ir. Nurjijah • Dharmokusumo • Zulkamaen • Roem Supardi • Mustota • Heru Setiono • Kandhi • Karan • Nurbj • Jan • Asep • Dudi Martapradja • Rusman Anarta • Hasbi • Landep Njs. • Sanusi • Sudiro • Drs. Soenarko • Katolo • K. Tugiman • Rachjudl Sumohadiatmodjo • Soedjipto, letKol. • Drs. Riyanto, Lettu • Moch.Bakri • Dr. Tjan Koen Lih • Dahlan Sallih, BA. • R.A. Sanusi • R.D. Soedralat, Brigdijen • Soeitrtio. Let.Ko. • Osmena • M.I. Jodeo Widagdo, SH, Major • Soedrajat • Kosasih • Niek Indrawati • Moh. Darmawan • Major Soepardjo T. • Hadi Susanto • D.rs, Sujanto • Aksan Kartadjarjo • Let. Kol. Soemitro • Drs. Dudy Sjariuddin, Lettu • R.D. Rahmat Mintaregda • Ors.Murtiantoro • Abdulmanan • A.R. Pulungan • Dullah Komary, Let.Kol. • Drs. Irsrawan • M. Alipara • Sjamsudin Astawidjaja • Amir Tisna • Soeparman • Anda Sjahrian • Harun Effendy • Soedarsono SH. • Kapt.B.L. Tobing • Moh.Darmawan • Drs. Soetarjo • Ir. J. Sardinjo • Sugeng • Drs. Moh.Slarwani • Drs. Na. Swan Gie • Hartawan, Bridgjen • Ir. P. Sihombing • Godjali • Ir. Soeafa • Amplias Tobing • Ir. Bratanata • Ir. Soemarjo • Ir. Soesanto Soedibjo • Dr. Didiin S. Sastrapradja • Sastro • Suratman • Drs. Soewarto • Ganis Harsono • Dr. Gani • Ir. Saemarjo Joswpranjoito.



The image shows an aerial view of the DPR RI building complex. The main building is a large, modern structure with a prominent entrance. In the foreground, there is a large parking lot filled with cars. To the left, there is a long, narrow structure, possibly a walkway or a covered area. The background shows other buildings and a clear sky. The title 'SELAYANG PANDANG GEDUNG DPR RI' is overlaid in large, white, 3D-style letters. Above the title is the emblem of the DPR RI, which features a Garuda bird in the center, surrounded by a circular arrangement of stars, and a banner below it with the text 'DPR RI'.

SELAYANG PANDANG GEDUNG DPR RI



Bagian Penerbitan
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021 - 571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id